

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Alex J. Sinaga
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Anggrek Nelimurni B-70 No. 38 Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Harry M. Zen
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. H. Namin No. 48 A Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2019



A 6000 Rupiah stamp with the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', 'EP3D2AFF805168402', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. Two blue ink signatures are written over the stamp.

Alex J. Sinaga
Direktur Utama

Harry M. Zen
Direktur Keuangan



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00910/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/IV/2019

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00910/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/IV/2019 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



David Sungkoro, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0691

29 April 2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-131

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,2u,3,31,36	17.439	25.145
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u,4,31,36	1.304	2.173
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,2ac,5,36		
Pihak berelasi	2c,31	2.126	1.545
Pihak ketiga		9.288	7.677
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,36	727	342
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6	717	631
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	340	10
Pajak dibayar di muka	2t,26	2.749	1.947
Tagihan restitusi pajak	2t,26	596	908
Aset lancar lainnya	2c,2i,2m,7,31	7.982	7.183
Jumlah Aset Lancar		<u>43.268</u>	<u>47.561</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,8	2.472	2.148
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2ab,2ac,9,34	143.248	130.171
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,2ab,11	5.032	3.530
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,26	2.504	2.804
Aset tidak lancar lainnya	2c,2g,2i,2n,2t,2u,10,26,31,36	9.672	12.270
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>162.928</u>	<u>150.923</u>
JUMLAH ASET		<u>206.196</u>	<u>198.484</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2o,2u,12,36		
Pihak berelasi	2c,31	993	896
Pihak ketiga		13.773	14.678
Utang lain-lain	2u,36	448	217
Utang pajak	2t,26	1.180	2.790
Beban yang masih harus dibayar	2c,2u,13,31,36	12.769	12.630
Pendapatan diterima di muka	2r,14	5.190	5.427
Uang muka pelanggan	2c,31	1.569	1.240
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u,15a,31,36	4.043	2.289
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,2v,15b,31,36	6.296	5.209
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>46.261</u>	<u>45.376</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,26	1.252	933
Pendapatan diterima di muka	2r,14	652	524
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,30	852	758
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,29	5.555	10.195
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,2v,16,31,36	33.748	27.974
Liabilitas lainnya	2u,2o,2aa	573	594
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>42.632</u>	<u>40.978</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>88.893</u>	<u>86.354</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,18	4.953	5.040
Tambahan modal disetor	2w,19	2.455	4.931
Modal saham yang diperoleh kembali	2w,20	-	(2.541)
Komponen ekuitas lainnya	2f,2u,21	507	387
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	28	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		75.658	69.559
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		98.910	92.713
Kepentingan nonpengendali	2b,17	18.393	19.417
JUMLAH EKUITAS		<u>117.303</u>	<u>112.130</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>206.196</u>	<u>198.484</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PENDAPATAN	2c,2r,22,31	130.784	128.256
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,24,31	(43.791)	(36.603)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,9,11	(21.406)	(20.446)
Beban karyawan	2c,2r,2s,23,31	(13.178)	(13.529)
Beban interkoneksi	2c,2r,31	(4.283)	(2.987)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,25,31	(6.137)	(5.260)
Beban pemasaran	2c,2r,31	(4.214)	(5.268)
Laba selisih kurs - bersih	2q	68	51
Penghasilan lain-lain	2l,2r,9c	1.752	1.039
Beban lain-lain	2r,9c	(750)	(1.320)
LABA USAHA		38.845	43.933
Penghasilan pendanaan	2c,31	1.014	1.434
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,31	(3.507)	(2.769)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	2f,8	53	61
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		36.405	42.659
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,26		
Pajak kini		(9.432)	(11.357)
Pajak tangguhan		6	1.399
		<u>(9.426)</u>	<u>(9.958)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		26.979	32.701
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,21	146	24
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,21	(10)	20
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,8	(14)	(1)
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba (rugi) aktuarial - bersih	2s,29	4.820	(2.375)
Penghasilan komprehensif lain - bersih		<u>4.942</u>	<u>(2.332)</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		31.921	30.369
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		18.032	22.145
Kepentingan nonpengendali	2b,17	8.947	10.556
		<u>26.979</u>	<u>32.701</u>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		22.844	19.952
Kepentingan nonpengendali	2b	9.077	10.417
		<u>31.921</u>	<u>30.369</u>
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	2x,27		
Laba bersih per saham		182,03	223,55
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		18.202,70	22.354,64

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk

Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2018		5.040	4.931	(2.541)	387	15.337	69.559	92.713	19.417	112.130
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	-	34	34
Akuisisi bisnis		-	(22)	-	(16)	-	-	(38)	65	27
Akuisisi kepemilikan kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-	-	-	(69)	(69)
Dividen kas	17,28	-	-	-	-	-	(16.609)	(16.609)	(10.131)	(26.740)
Penarikan modal saham yang diperoleh kembali	2v,20	(87)	(2.454)	2.541	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	18.032	18.032	8.947	26.979
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	136	-	4.676	4.812	130	4.942
Saldo, 31 Desember 2018		4.953	2.455	-	507	15.337	75.658	98.910	18.393	117.303

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2017		5.040	4.931	(2.541)	339	15.337	61.278	84.384	21.160	105.544
Penambahan setoran modal		-	-	-	-	-	-	-	50	50
Akuisisi bisnis	2d	-	-	-	4	-	-	4	-	4
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	145	145
Dividen kas	2w,28	-	-	-	-	-	(11.627)	(11.627)	(12.355)	(23.982)
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	22.145	22.145	10.556	32.701
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	44	-	(2.237)	(2.193)	(139)	(2.332)
Saldo, 31 Desember 2017		5.040	4.931	(2.541)	387	15.337	69.559	92.713	19.417	112.130

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		127.855	125.111
Penerimaan restitusi pajak		2.578	585
Penerimaan dari pendapatan bunga		1.036	1.431
Pembayaran kas untuk beban		(54.099)	(49.604)
Pembayaran kas kepada karyawan		(12.657)	(11.739)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(10.375)	(11.846)
Pembayaran beban bunga		(3.735)	(3.133)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih (Pembayaran) penerimaan kas lainnya - bersih		(3.434) (1.498)	(1.942) 542
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		45.671	49.405
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	9	629	1.367
Penerimaan (penempatan) deposito berjangka dan aset keuangan tersedia untuk dijual		171	(676)
Hasil dari klaim asuransi	9	153	155
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	8	9	28
Pembelian aset tetap	9,38	(31.562)	(32.294)
Pembelian aset takberwujud	11,38	(2.972)	(508)
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	1d	(420)	(243)
Penambahan penyertaan jangka panjang	8	(337)	(269)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(300)	(490)
Pembelian pada aset lainnya		(461)	(77)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(35.090)	(33.007)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	35.364	12.169
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		34	50
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	(27.113)	(9.289)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	28	(16.609)	(11.627)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(10.134)	(12.355)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan		(18.458)	(21.052)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(7.877)	(4.654)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		171	32
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	25.145	29.767
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	17.439	25.145

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “*Post en Telegraafdienst*”, yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) (Catatan 1c dan 18).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu serta kebutuhan Perusahaan untuk mengubah ketentuan terkait modal ditempatkan dan disetor, serta modal dasar sehubungan dengan adanya pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. No. 34 dan No. 35 tanggal 15 Mei 2018. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0214555 tanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0013328.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/ atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/ mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama:

- i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

b. Usaha penunjang:

- i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- iii. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/ M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/ M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/ M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., No. 54 tanggal 27 April 2018 dan No. 28 tanggal 21 April 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Komisaris Utama	Hendri Saparini	Hendri Saparini
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah	Rinaldi Firmansyah
Komisaris	Rinaldi Firmansyah	Hadiyanto
Komisaris	Isa Rachmatarwata	-
Komisaris Independen	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen*	-	Dolfie Othniel Fredric Palit
Komisaris Independen	Pamijati Pamela Johanna	Pamijati Pamela Johanna
Komisaris Independen	Cahyana Ahmadjayadi	Cahyana Ahmadjayadi
Direktur Utama	Alex Janangkih Sinaga	Alex Janangkih Sinaga
Direktur Keuangan	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital and Strategic Portfolio</i>	David Bangun	David Bangun
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Dian Rachmawan	Dian Rachmawan
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Abdus Somad Arief	Abdus Somad Arief
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Zulhelfi Abidin	Zulhelfi Abidin
Direktur <i>Consumer Service</i>	Siti Choiriana	Mas'ud Khamid

* Dolfie Othniel Fredric Palit telah ditetapkan sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhitung tanggal 20 September 2018, sehingga masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen perusahaan berakhir demi hukum.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

2. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ketua	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Tjatur Purwadi
Anggota	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Anggota	-	Dolfie Othniel Fredric Palit
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Cahyana Ahmadjayadi	Cahyana Ahmadjayadi
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah 24.071 orang dan 24.065 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pembedakan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, tanggal 20 Juni 2008, dan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 20).

Pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham kembali sebanyak 211.290.500 saham dari publik yang merupakan program pembelian kembali saham tahap pertama. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan menjual kembali seluruh saham tersebut (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali tahap III (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham seri B (Catatan 18). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Desember 2018, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 68.824.067 ADS telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 18).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 16b.i).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sisa saham hasil pembelian kembali saham tahap III (Catatan 20).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali saham hasil pembelian kembali saham tahap IV (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 27 April 2018 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 54 tanggal 27 April 2018 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali sejumlah 1.737.779.800 lembar saham dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetorkan penuh (Catatan 20).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2018	2017	2018	2017
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	82.650	85.748
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	16.524	13.275
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	13.053	13.606
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TI"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	10.408	9.125
PT Graha Sarana Duta ("GSD") Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	5.805	5.641
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.244	5.716
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	4.004	3.473
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	3.351	1.871
PT Telkom Satelit Indonesia* ("Telkomsat"), sebelumnya PT Patra Telekomunikasi Indonesia Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	3.192	576

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2018	2017	2018	2017
PT Metra-net ("Metranet"), Jakarta Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	782	524
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin"), Jakarta, Indonesia	Jasa pembayaran - kegiatan prinsipal, kegiatan <i>switching</i> , kliring, dan <i>settlement</i> / 3 November 2016	2016	100	100	298	225
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Voice Over Data (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2018	2017	2018	2017
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	7.785	6.064
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.413	3.048
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.389	2.122
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.128	2.009
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.339	1.106
Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	1.185	710
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.011	907

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2018	2017	2018	2017
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	979	658
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN") Petaling jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	49	832	818
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	677	639
PT Swadharna Sarana Informatika ("Swadharna"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	-	460	-
PT Melon ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	457	231
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	346	273
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	290	303
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	250	178
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	168	203
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	115	123
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	93	60
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	57	36
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	49	76	23
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	16	18

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(a) Metra

Berdasarkan akta jual beli saham No. 10 dan 11 Notaris Utiék Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., tanggal 13 Desember 2017, Metra membeli saham Nutech sebanyak 36.000 saham dengan harga perolehan sebesar Rp24 miliar, setelah akuisisi Metra memiliki 60% porsi kepemilikan atas Nutech. Nilai harga perolehan tersebut lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp13 miliar. Per 31 Desember 2017, selisih tersebut, sebesar Rp11 miliar, dicatat sebagai *goodwill* (Catatan 11). Berdasarkan laporan Penilai Independen, nilai wajar atas aset bersih adalah sebesar Rp18 miliar. Selisih antara nilai wajar aset bersih dicatat sebesar Rp6 miliar sebagai *goodwill* (Catatan 11).

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3, 4, dan 5 Notaris Utiék Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.kn, tanggal 2 April 2018, Metra membeli saham PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang dimiliki oleh Yayasan Danar Dana Swadharma, PT Tri Handayani Utama, dan Koperasi Swadharma sebanyak 14.600 lembar atau setara dengan 36,50% kepemilikan saham dari SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp220 miliar.

Berdasarkan Akta No. 4 Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn, tanggal 9 April 2018, Perusahaan sebagai pemegang saham Metra menyetujui mengambil bagian atas 11.837 lembar saham baru yang diterbitkan oleh SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp178 miliar. Atas perubahan tersebut terdapat perubahan komposisi kepemilikan Perusahaan atas SSI menjadi 51% sehingga Perusahaan memiliki pengendalian atas SSI sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp397 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp210 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham SSI lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp196 miliar per tanggal 31 Desember 2018, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perhitungan *purchase price allocation* atas akuisisi ini masih dalam proses.

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh Swadharma dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp630 miliar dan Rp101 miliar. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh SSI dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar Rp823 miliar dan Rp110 miliar.

(b) Sigma

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 151 dan 152 Notaris Utiék Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., Mkn, tanggal 28 Desember 2018, Sigma membeli saham PT Collega Inti Pratama (CIP) sebanyak 2.493 saham (setara dengan 67% kepemilikan saham) dari PT Upperco Usaha Maxima dengan harga Rp208 miliar, dan sebanyak 111 saham (setara dengan 3% kepemilikan saham) dari PT Abdi Anugerah Persada dengan harga Rp9 miliar, sehingga kepemilikan SCC pada CIP menjadi 2.604 saham (setara dengan 70% kepemilikan saham) sehingga SCC memiliki pengendalian atas CIP sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp217 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp188 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham CIP lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp165 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) Sigma (lanjutan)

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang dicatat oleh CIP dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp nihil. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh CIP dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar Rp166 miliar dan Rp24 miliar.

(c) TII

Pada tanggal 14 Desember 2017, TII membeli 49% kepemilikan saham di TSGN sebesar MYR66.150.000 atau setara dengan Rp220 miliar. TSGN bergerak dalam jasa penyediaan sistem ICT (*Information and Communication Technologies*) untuk *satellite communication services, satellite bandwidth services* dan *Very Small Aperture Terminal ("VSAT") services*. Kepentingan nonpengendali pada pihak akuisisi diukur pada nilai wajar. Berdasarkan *Sale and Subscription Agreement*, TII memperoleh hak pengendalian atas TSGN melalui penempatan dan penggantian 3 dari 5 manajemen kunci yang mengendalikan keseluruhan bisnis TSGN. Pada tanggal 25 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham tambahan.

Akuisisi ini akan meningkatkan sinergi serta pendayagunaan aset dan sumber daya antar perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih inovatif untuk pelanggan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>Total</u>
Aset	
Kas dan setara kas	21
Piutang usaha	18
Aset lancar lainnya	57
Aset tetap (Catatan 9)	770
Aset tidak lancar lainnya	20
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(422)
Liabilitas jangka panjang	(155)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	309
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(157)
<i>Goodwill</i> (Catatan 11)	68
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	220

Pada tanggal 2 Juli 2013, TII mendirikan Telin Malaysia dengan kepemilikan 49% dan pada tanggal 18 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham yang dimiliki oleh Compudyne Telecommunication Systems Sdn, Bhd dengan harga perolehan MYR8.764.798 atau setara dengan Rp31 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp16 miliar). Sehubungan dengan akuisisi saham Telin Malaysia, TII mengakui *provisional goodwill* Rp61 miliar (Catatan 11).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(c) TII (lanjutan)

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan rugi sebelum pajak Telin Malaysia yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp23 miliar dan Rp20 miliar. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan rugi sebelum pajak yang diakui oleh Telin Malaysia dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar MYR13.323.065 (setara dengan Rp47 miliar) dan MYR7.888.930 (setara dengan Rp28 miliar).

e. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 April 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2019:

- **Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis**
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Pihak pengakuisisi menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama pada nilai wajarnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2019 (lanjutan):

- **Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program**
Amandemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen ini juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.
- **Amandemen PSAK 26: Biaya Pinjaman tentang Biaya Pinjaman yang Dapat Dikapitalisasi**
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.
- **Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan**
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- **Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama**
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.
- **ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka**
ISAK 33 mendefinisikan bahwa tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka adalah tanggal transaksi sebagaimana dimaksud PSAK 10 paragraf 22, yaitu tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, liabilitas atau penghasilan terkait (atau bagian darinya).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2019 (lanjutan):

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
ISAK 34 mengklarifikasi bagaimana menerapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46 “Pajak Penghasilan” ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan, ISAK 34 mengatur:
 - apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah;
 - asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan;
 - bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak; dan
 - bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan dalam fakta dan keadaan.

Berlaku efektif 1 Januari 2020:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan
PSAK 71 merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru. PSAK ini tetap mempertahankan kriteria pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 71 menggantikan ketentuan akuntansi instrumen keuangan yang saat ini diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
PSAK 72 menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui. PSAK ini memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan kepada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan panduan spesifik yang mewajibkan beberapa jenis biaya untuk mendapatkan dan atau memenuhi kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu kepada transfer barang dan jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.

- PSAK 73: Sewa
PSAK 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur seluruh sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang sama dengan akuntansi sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 memberikan dua pengecualian kepada penyewa terkait model akuntansi tersebut, yaitu untuk sewa dengan aset pendasar bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa akan mengakui kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa juga secara terpisah akan mengakui beban bunga atas kewajiban sewa dan biaya penyusutan pada aset sewa.

Akuntansi untuk pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi yang diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan melanjutkan pengklasifikasian seluruh sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana yang saat ini diatur dalam PSAK 30.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan):

- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi akan berlaku efektif 1 Januari 2022, namun amandemen tersebut tidak berdampak bagi laporan konsolidasian Grup.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu.
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional Cellum Global Zrt ("Cellum") adalah Forint Hungaria ("HUF") dan PT Cipta Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dollar"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan vauzer Prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi perkiraan biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasi untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditanggung sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd, dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd yang menggunakan Ringgit Malaysia. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2018		2017	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.375	14.385	13.565	13.570
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.157	10.167	10.592	10.598
Euro 1	16.432	16.446	16.231	16.242
Yen Jepang 1	130,56	130,70	120,48	120,55
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.474	3.480	3.520	3.526

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 21).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

i. Pendapatan telepon selular (lanjutan)

Pendapatan dari jasa Prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan vauker perdana) dan vauker isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauker Prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan revidu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan adalah 23 tahun.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

PPh final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Beban lain-lain".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" dan "Penyertaan Jangka Panjang" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale investment*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- a. situasi bisnis yang normal;
- b. peristiwa kegagalan; dan
- c. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 36.

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

w. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

y. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

z. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ac. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 29 dan 30.

ii. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 9.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggahan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 26.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

		2018		2017	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah
Kas	Rp	-	36	-	12
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	1.199	-	1.481
	US\$	10	139	27	367
	JPY	8	1	7	1
	EUR	1	20	1	17
	HKD	1	1	1	2
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	791	-	968
	US\$	2	28	1	13
	EUR	0	0	0	6
	SGD	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	728	-	466
	US\$	2	31	6	82
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	Rp	-	342	-	7
Lain-lain	Rp	-	15	-	14
	US\$	0	0	0	1
Sub-jumlah			<u>3.295</u>	<u>0</u>	<u>3.425</u>
Pihak ketiga					
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	218	-	278
	US\$	2	30	0	2
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	1	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	12	181	14	184
	HKD	5	9	4	6
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	10	148	11	154
	SGD	1	14	0	1
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	-	17	-	23
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	4	55	1	15
	SGD	1	14	0	2
	MYR	3	9	2	8
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	197	-	361
	US\$	4	60	4	46
	EUR	1	20	1	20
	MYR	3	12	0	0
	TWD	17	8	8	4
	AUD	0	2	0	1
	HKD	0	0	0	0
	MOP	0	0	0	0
Sub-jumlah			<u>995</u>	<u>0</u>	<u>1.105</u>
Jumlah bank			<u>4.290</u>	<u>0</u>	<u>4.530</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	2.640	-	5.315
	US\$	58	837	9	116
BTN	Rp	-	2.559	-	2.958
	US\$	31	446	-	-
BRI	Rp	-	1.911	-	4.954
	US\$	47	676	15	203
Bank Mandiri	Rp	-	611	-	446
	US\$	16	230	-	-
Sub-jumlah			<u>9.910</u>	<u>0</u>	<u>13.992</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2018		2017	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	1.295	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	-	181	676
	US\$	25	363	30
UOB	US\$	30	429	20
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	365	-
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	248	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	190	-
	US\$	-	-	2
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp	-	40	-
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")	Rp	-	-	-
SCB	US\$	-	-	10
PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")	Rp	-	-	-
	US\$	-	-	5
Lain-lain	Rp	-	53	-
	MYR	11	39	14
Sub-jumlah			<u>3.203</u>	<u>6.611</u>
Jumlah deposito berjangka			<u>13.113</u>	<u>20.603</u>
Jumlah			<u>17.439</u>	<u>25.145</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Rupiah	2,50%-9,25%	2,85%-8,50%
Mata uang asing	0,50%-3,75%	0,40%-1,75%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	2018		2017	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1	-	-
BRI	Rp	-	-	-	2
Pihak ketiga					
SCB	US\$	8	116	8	109
UOB	US\$	3	45	14	191
HSBC	US\$	3	43	-	-
Lain-lain	Rp	-	-	-	23
Jumlah deposito berjangka			<u>205</u>		<u>325</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual					
Pihak berelasi					
PT Mandiri Manajemen Investasi	Rp	-	379	-	711
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	91	-	360
Lainnya	Rp	-	-	-	80
Sub-jumlah			<u>470</u>		<u>1.151</u>
Pihak Ketiga	Rp	-	-	-	17
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			<u>470</u>		<u>1.168</u>
Rekening penampungan					
Rp		-	136	-	318
US\$		0	1	6	78
MYR		5	16	5	15
Lainnya					
Rp		-	476	-	263
US\$		-	-	0	6
MYR		-	-	0	0
AUD		-	-	0	0
Jumlah			<u>1.304</u>		<u>2.173</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	2018	2017
Rupiah	5,00%	6,00%-7,00%
Mata uang asing	1,35%-1,92%	1,38%-1,64%

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BUMN	1.649	721
Indonusa	522	465
PT Indosat Tbk ("Indosat")	219	372
Lain-lain	467	670
Jumlah	2.857	2.228
Provisi penurunan nilai piutang	(731)	(683)
Jumlah bersih	<u>2.126</u>	<u>1.545</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pelanggan individual dan bisnis	12.044	9.808
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	1.542	1.517
Jumlah	13.586	11.325
Provisi penurunan nilai piutang	(4.298)	(3.648)
Jumlah bersih	<u>9.288</u>	<u>7.677</u>

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sampai dengan 3 bulan	1.748	1.405
3 sampai dengan 6 bulan	296	100
Lebih dari 6 bulan	813	723
Jumlah	2.857	2.228
Provisi penurunan nilai piutang	(731)	(683)
Jumlah bersih	<u>2.126</u>	<u>1.545</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sampai dengan 3 bulan	8.006	6.809
3 sampai dengan 6 bulan	1.502	688
Lebih dari 6 bulan	4.078	3.828
Jumlah	13.586	11.325
Provisi penurunan nilai piutang	(4.298)	(3.648)
Jumlah bersih	<u>9.288</u>	<u>7.677</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	2018		2017	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	7.512	394	6.788	920
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.244	281	1.426	281
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.797	329	788	258
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	4.890	4.025	4.551	2.872
Jumlah	16.443	5.029	13.553	4.331

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp4.296 miliar dan Rp3.354 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	2018	2017
Rupiah	2.850	2.187
Dolar A.S.	7	41
Lain-lain	0	0
Jumlah	2.857	2.228
Provisi penurunan nilai piutang	(731)	(683)
Jumlah bersih	2.126	1.545

(ii) Pihak ketiga

	2018	2017
Rupiah	11.348	10.300
Dolar A.S.	2.118	968
Dolar Australia	19	19
Lain-lain	101	38
Jumlah	13.586	11.325
Provisi penurunan nilai piutang	(4.298)	(3.648)
Jumlah bersih	9.288	7.677

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo awal	4.331	2.990
Provisi yang diakui selama tahun berjalan (Catatan 25)	1.724	1.494
Penghapusbukuan piutang	<u>(1.026)</u>	<u>(153)</u>
Saldo akhir	<u>5.029</u>	<u>4.331</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp7.116 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16c).

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Komponen	429	447
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	137	168
Lain-lain	<u>218</u>	<u>69</u>
Jumlah	<u>784</u>	<u>684</u>
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(38)	(24)
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	(28)	(29)
Lain-lain	<u>(1)</u>	<u>0</u>
Jumlah	<u>(67)</u>	<u>(53)</u>
Jumlah bersih	<u>717</u>	<u>631</u>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo awal	53	47
Provisi yang diakui selama tahun berjalan	22	6
Penghapusbukuan persediaan	<u>(8)</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u>67</u>	<u>53</u>

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.625 miliar dan Rp2.458 miliar (Catatan 24).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp235 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16c).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, modul dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp125 miliar dan Rp143 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp176 miliar dan Rp256 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2018	2017
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 34c.i)	3.636	3.760
Uang muka	1.803	1.156
Sewa dibayar di muka	1.382	1.349
Gaji dibayar di muka	200	227
Panjar kerja	30	35
Lain-lain	931	656
Jumlah	7.982	7.183

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut:

	2018							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Tiphone ^a	24,00	1.539	-	87	(9)	(15)	-	1.602
Indonusa ^b	20,00	221	-	(11)	-	-	-	210
Teltranet ^c	51,00	18	-	(19)	-	1	-	0
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^d	49,00	43	-	1	-	0	-	44
PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") ^e	45,00	14	-	0	-	-	-	14
Cellum ^f	30,40	-	84	(5)	-	-	-	79
Lain-lain ^g	25,00-32,00	4	-	0	-	0	-	4
Sub-jumlah		1.839	84	53	(9)	(14)	-	1.953
Penyertaan jangka panjang lainnya		309	253	-	-	-	(43)	519
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.148	337	53	(9)	(14)	(43)	2.472

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2018:

	Tiphone	Indonusa	Teltranet	ILCS	GSN	Cellum	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>							
Aset lancar	7.615	449	269	132	184	22	201
Aset tidak lancar	892	310	116	47	-	43	601
Liabilitas jangka pendek	(1.466)	(571)	(269)	(87)	154	(23)	(663)
Liabilitas jangka panjang	(3.062)	(297)	(138)	(2)	-	(20)	(1.863)
Ekuitas (defisit)	3.979	(109)	(22)	90	338	22	(1.724)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>							
Pendapatan	29.228	824	206	164	5	22	95
Beban operasional	(28.117)	(583)	(264)	(162)	(5)	(46)	(233)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(391)	(39)	(13)	1	1	(10)	(33)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	720	202	(71)	3	1	(34)	(171)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(137)	(55)	12	(1)	(0)	-	(1)
Laba (rugi) tahun berjalan	583	147	(59)	2	1	(34)	(172)
Laba (rugi) komprehensif lain	(63)	(3)	1	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	520	144	(58)	2	1	(34)	(172)

	2017						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,00	1.488	-	80	(28)	(1)	1.539
Indonusa ^b	20,00	221	-	-	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	38	-	(20)	-	-	18
ILCS ^d	49,00	42	-	1	-	-	43
GSN ^e	45,00	-	14	0	-	-	14
Lain-lain ^g	25,00-49,00	-	4	(0)	-	(0)	4
Sub-jumlah		1.789	18	61	(28)	(1)	1.839
Penyertaan jangka panjang lainnya		58	251	-	-	-	309
Jumlah penyertaan jangka panjang		1.847	269	61	(28)	(1)	2.148

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2017:

	Tiphone	Indonusa	Teltranet	ILCS	GSN	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	8.084	307	174	145	1	190
Aset tidak lancar	994	415	101	32	185	606
Liabilitas jangka pendek	(2.107)	(877)	(149)	(87)	(27)	(724)
Liabilitas jangka panjang	(3.255)	(177)	(90)	(2)	(129)	(1.882)
Ekuitas (defisit)	3.716	(332)	36	88	30	(1.810)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	27.914	692	209	122	0	106
Beban operasional	(27.217)	(333)	(255)	(116)	(0)	(287)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(246)	(364)	(5)	(4)	(0)	(19)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	451	(5)	(51)	2	0	(200)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(116)	-	13	1	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	335	(5)	(38)	3	0	(200)
Laba (rugi) komprehensif lain	(3)	-	(0)	(0)	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	332	(5)	(38)	3	0	(200)

^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.649 miliar dan Rp1.755 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp940 dan Rp1.000 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Aset	8.507	9.078
Liabilitas	(4.528)	(5.362)
Aset bersih	3.979	3.716
Bagian grup atas aset bersih (24,00% tahun 2018 dan 2017)	955	892
<i>Goodwill</i>	647	647
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	1.602	1.539

^b Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%.

^c Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet. Bagian kumulatif rugi atas investasi di Teltranet yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11 miliar.

^d ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^e Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan GSN yang menjalankan usaha *real estate* dan pemasaran perumahan dan apartemen.

^f Investasi pada Cellum dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian penyertaan saham baru bersyarat antara Metranet dengan Cellum Global Zrt pada tanggal 30 Januari 2018. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi *mobile payment* dan *commerce services*.

^g Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp263 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.519	46	39	-	22	1.626
Bangunan	9.802	43	67	(1)	1.922	11.833
Renovasi bangunan sewa	1.257	-	23	(24)	119	1.375
Peralatan sentral telepon	18.463	-	818	(1.920)	(2.070)	15.291
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.583	-	3	-	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	133.797	-	3.266	(6.398)	10.743	141.408
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	9.300	-	2.414	(3)	261	11.972
Jaringan kabel	47.155	-	5.887	(36)	(7.555)	45.451
Catu daya	16.279	13	484	(187)	1.275	17.864
Peralatan pengolahan data	13.294	23	140	(540)	1.348	14.265
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.659	-	1.765	-	(1)	3.423
Peralatan kantor	1.557	46	471	(18)	86	2.142
Kendaraan	439	6	203	(1)	(6)	641
Peralatan lainnya	97	-	18	-	(21)	94
Aset dalam pembangunan	4.415	2	17.821	(23)	(17.339)	4.876
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.582	-	21	-	-	5.603
Peralatan pengolahan data	83	-	-	(82)	-	1
Kendaraan	401	-	176	-	1	578
Peralatan kantor	80	-	4	(68)	-	16
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	215	-	-	(90)	-	125
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>267.251</u>	<u>179</u>	<u>33.620</u>	<u>(9.391)</u>	<u>(11.215)</u>	<u>280.444</u>

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.880	-	513	(1)	13	3.405
Renovasi bangunan sewa	823	-	150	(24)	-	949
Peralatan sentral telepon	14.553	-	1.307	(1.920)	(3.390)	10.550
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	802	-	518	-	-	1.320
Peralatan dan instalasi transmisi	69.240	-	10.958	(5.579)	(372)	74.247
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.334	-	677	(3)	(3)	5.005
Jaringan kabel	17.864	-	2.076	(36)	(7.719)	12.185
Catu daya	11.154	-	1.332	(177)	7	12.316
Peralatan pengolahan data	10.236	-	1.040	(519)	(10)	10.747
Peralatan telekomunikasi lainnya	602	-	428	-	(1)	1.029
Peralatan kantor	1.036	-	290	(18)	4	1.312
Kendaraan	226	-	62	(1)	(6)	281
Peralatan lainnya	96	-	4	-	(25)	75
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.638	-	603	-	-	3.241
Peralatan pengolahan data	76	-	7	(82)	-	1
Kendaraan	66	-	60	-	-	126
Peralatan kantor	80	-	44	(54)	-	70
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	120	-	43	(90)	-	73
Aset PBH	234	-	10	-	-	244
Jumlah	<u>137.080</u>	<u>-</u>	<u>20.122</u>	<u>(8.504)</u>	<u>(11.502)</u>	<u>137.196</u>
Nilai buku bersih	<u>130.171</u>					<u>143.248</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2017	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2017
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.417	40	62	-	-	1.519
Bangunan	7.837	39	211	(3)	1.718	9.802
Renovasi bangunan sewa	1.116	-	34	(25)	132	1.257
Peralatan sentral telepon	20.490	69	556	(977)	(1.675)	18.463
Peralatan telegraf, telex dan komunikasi data	1.586	-	-	-	(3)	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	121.552	-	2.420	(4.489)	14.314	133.797
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	8.445	573	1.233	(2.202)	1.251	9.300
Jaringan kabel	44.791	-	5.715	(694)	(2.657)	47.155
Catu daya	15.022	-	222	(456)	1.491	16.279
Peralatan pengolahan data	12.515	-	715	(602)	666	13.294
Peralatan telekomunikasi lainnya	700	-	966	(7)	-	1.659
Peralatan kantor	1.453	11	327	-	(234)	1.557
Kendaraan	387	-	65	(13)	-	439
Peralatan lainnya	100	-	-	-	(3)	97
Aset dalam pembangunan	4.550	-	20.110	(96)	(20.149)	4.415
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.354	-	228	-	-	5.582
Peralatan pengolahan data	84	-	-	(1)	-	83
Kendaraan	135	-	290	(24)	-	401
Peralatan kantor	76	-	-	(84)	88	80
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	215	-	-	-	-	215
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>248.099</u>	<u>732</u>	<u>33.154</u>	<u>(9.673)</u>	<u>(5.061)</u>	<u>267.251</u>

	1 Januari 2017	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2017
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.435	-	407	-	38	2.880
Renovasi bangunan sewa	692	-	149	(23)	5	823
Peralatan sentral telepon	16.650	-	1.391	(977)	(2.511)	14.553
Peralatan telegraf, telex dan komunikasi data	333	-	416	-	53	802
Peralatan dan instalasi transmisi	62.302	-	10.629	(3.642)	(49)	69.240
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.098	-	595	(2.202)	(1.157)	4.334
Jaringan kabel	20.301	-	1.992	(693)	(3.736)	17.864
Catu daya	10.164	-	1.274	(286)	2	11.154
Peralatan pengolahan data	9.468	-	1.372	(581)	(23)	10.236
Peralatan telekomunikasi lainnya	461	-	149	(7)	(1)	602
Peralatan kantor	846	-	189	(9)	10	1.036
Kendaraan	168	-	66	(8)	-	226
Peralatan lainnya	99	-	1	-	(4)	96
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.054	-	584	-	-	2.638
Peralatan pengolahan data	44	-	29	(1)	4	76
Kendaraan	32	-	47	(13)	-	66
Peralatan kantor	94	-	26	(56)	16	80
Aset CPE	19	-	1	-	-	20
Catu daya	98	-	22	-	-	120
Aset PBH	243	-	13	-	(22)	234
Jumlah	<u>133.601</u>	<u>-</u>	<u>19.352</u>	<u>(8.498)</u>	<u>(7.375)</u>	<u>137.080</u>
Nilai buku bersih	<u>114.498</u>					<u>130.171</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2018	2017
Hasil penjualan aset tetap	629	1.367
Nilai buku bersih	(1)	(1.009)
Labanya dari penjualan aset tetap	<u>628</u>	<u>358</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Penurunan nilai aset

Pada tahun 2014, Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak, dan telah melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel secara penuh di tahun 2015.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah menghapusbukkan aset bisnis sambungan nirkabel yang telah disusutkan secara penuh dengan harga perolehan sebesar Rp3.193 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2018, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2018.

c. Lain-lain

(i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp271 miliar dan Rp328 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 9,68%-11,00% dan 8,15%-11,00% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(iii) Pada tahun 2018 dan 2017, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp153 miliar dan Rp155 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahun 2018 dan 2017, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp51 miliar dan Rp7 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(iv) Pada tahun 2018 dan 2017, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp341 miliar dan Rp620 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi, dan melakukan percepatan pencatatan penyusutan. Dampak penambahan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp378 miliar.

Pada tahun 2014, umur manfaat bangunan dan transmisi Telkomsel diubah masing-masing dari 20 tahun menjadi 40 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 15 dan 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis bangunan dan transmisi pada saat ini. Dampak perubahan estimasi masa manfaat bangunan dan transmisi tersebut di tahun 2018 adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp135 miliar.

Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp925 miliar. Dampak perubahan umur manfaat ini atas laba sebelum pajak di masa yang akan datang, sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Kenaikan (Penurunan)</u>
2019	637
2020	266
2021	18
2022	(106)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

(v) Pertukaran aset tetap

Pada tahun 2012 dan 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing dengan PT Len Industri ("LEN") dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI").

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah menghapusbukkan aset jaringan tembaga dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1 miliar dan telah mencatat aset jaringan *fiber optic* hasil pertukaran aset dengan nilai masing-masing sebesar Rp0 dan Rp506 miliar.

Pada tahun 2018 dan 2017, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp777 miliar dan Rp816 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan PT ZTE Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2018, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp340 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(vii) Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp134.586 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp16.059 miliar, US\$47 juta, HKD9 juta, dan SGD225 juta dan MYR37 juta dan *first loss basis* sebesar Rp2.760 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

(viii) Pada tanggal 31 Desember 2018, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 62,80% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian sampai dengan September 2020. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(ix) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 16b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp8.077 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15, 16c dan 16d).

(x) Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp50.633 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.

(xi) Pada tahun 2018, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp33.557 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (xii) Pada tanggal 25 Agustus 2017, Satelit Telkom-1 mengalami gangguan teknis yang berdampak pada gangguan layanan terhadap pelanggan, sehingga Perusahaan melakukan proses pemulihan dengan migrasi layanan pelanggan ke satelit Perusahaan lainnya (Telkom-3S dan Telkom-2), serta ke beberapa satelit pihak ketiga. Proses migrasi layanan pelanggan ini telah selesai dilakukan pada tanggal 10 September 2017, dan atas biaya yang timbul atas proses migrasi ini diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga perolehan dan akumulasi penyusutan Satelit Telkom-1 sebesar Rp1.165 miliar disajikan sebagai bagian dari kelompok aset yang dilepaskan dalam "Aset tidak lancar lainnya".
- (xiii) Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruangan di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tahun	2018	2017
2018	-	1.083
2019	1.049	969
2020	945	866
2021	781	778
2022	605	605
2023	254	254
Selanjutnya	130	130
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.764	4.685
Bunga	(619)	(881)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.145	3.804
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)	(807)	(794)
Bagian jangka panjang (Catatan 16)	2.338	3.010

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.089	1.293
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	930	1.120
PT Mandiri Utama Finance	186	198
PT Solusi Tunas Pratama	181	212
PT Putra Arga Binangun	159	189
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	103	135
PT Bali Towerindo Sentra	86	100
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	411	557
Jumlah	3.145	3.804

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	2.662	2.688
Tagihan restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	2.450	3.085
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.743	2.019
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	1.142	753
Beban tanggungan	474	413
Uang muka pembelian aset tetap	387	2.805
Obligasi konversi	213	64
Kas yang dibatasi penggunaannya	183	31
Setoran jaminan	173	116
Lain-lain	245	296
Jumlah	9.672	12.270

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban tanggungan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp56 miliar dan Rp46 miliar.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2018	680	8.387	84	635	9.786
Penambahan	-	2.328	14	19	2.361
Akuisisi	422	1	2	-	425
Pengurangan	-	(51)	(11)	-	(62)
Reklasifikasi/translasi	(36)	15	5	33	17
Saldo, 31 Desember 2018	<u>1.066</u>	<u>10.680</u>	<u>94</u>	<u>687</u>	<u>12.527</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2018	(29)	(5.714)	(71)	(442)	(6.256)
Beban amortisasi	-	(1.226)	(9)	(49)	(1.284)
Pengurangan	-	51	4	-	55
Reklasifikasi/translasi	-	(7)	(5)	2	(10)
Saldo, 31 Desember 2018	<u>(29)</u>	<u>(6.896)</u>	<u>(81)</u>	<u>(489)</u>	<u>(7.495)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.037</u>	<u>3.784</u>	<u>13</u>	<u>198</u>	<u>5.032</u>

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2017	449	7.222	75	607	8.353
Penambahan	-	1.289	3	21	1.313
Akuisisi	232	4	-	-	236
Pengurangan	(3)	(122)	-	(11)	(136)
Reklasifikasi/translasi	2	(6)	6	18	20
Saldo, 31 Desember 2017	<u>680</u>	<u>8.387</u>	<u>84</u>	<u>635</u>	<u>9.786</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2017	(29)	(4.776)	(56)	(403)	(5.264)
Beban amortisasi	-	(1.037)	(9)	(48)	(1.094)
Pengurangan	-	95	-	11	106
Reklasifikasi/translasi	-	4	(6)	(2)	(4)
Saldo, 31 Desember 2017	<u>(29)</u>	<u>(5.714)</u>	<u>(71)</u>	<u>(442)</u>	<u>(6.256)</u>
Nilai buku bersih	<u>651</u>	<u>2.673</u>	<u>13</u>	<u>193</u>	<u>3.530</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon (2016), GSDm (2016), TSGN (2017), Nutech (2017), Swadharma (2018), CIP (2018), dan Telin Malaysia (2018) (Catatan 1d).
- (ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak adalah 1-5 tahun.
- (iii) Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp4.463 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	804	574
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	189	322
Sub-jumlah	<u>993</u>	<u>896</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	10.874	11.662
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.471	1.561
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.428	1.455
Sub-jumlah	<u>13.773</u>	<u>14.678</u>
Jumlah	<u>14.766</u>	<u>15.574</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Rupiah	11.726	13.344
Dolar A.S.	2.978	2.167
Lain-lain	62	63
Jumlah	<u>14.766</u>	<u>15.574</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	8.013	7.093
Umum, administrasi dan pemasaran	2.299	2.684
Gaji dan tunjangan	2.219	2.664
Beban bunga dan administrasi bank	238	189
Jumlah	<u>12.769</u>	<u>12.630</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

a. Pendapatan diterima di muka jangka pendek

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kartu pulsa Prabayar	4.374	4.800
Sewa menara telekomunikasi	356	300
Jasa telekomunikasi lainnya	284	148
Lain-lain	176	179
Jumlah	<u>5.190</u>	<u>5.427</u>

b. Pendapatan diterima di muka jangka panjang

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	258	205
Jasa telekomunikasi lainnya	394	319
Jumlah	<u>652</u>	<u>524</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	2018		2017	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	956	-	1.252
Bank Mandiri	Rp	-	-	-	45
Sub-jumlah			956		1.297
Pihak ketiga					
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	1.295	-	-
DBS	Rp	-	699	-	408
	US\$	1	13	-	-
UOB	Rp	-	580	-	400
HSBC	Rp	-	317	-	18
	US\$	0	4	-	-
SCB	Rp	-	100	-	-
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	83
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Sumitomo")	Rp	-	-	-	80
Lain-lain	Rp	-	1	-	3
Sub-jumlah			3.087		992
Jumlah			4.043		2.289

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BNI							
2014 - 2017	GSD ^e , Sigma ^a	Rp	375	9 Januari 2019 - 8 November 2019	Bulanan	9,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2013 - 2018	Telkom Infratel, Infomedia ^f , MD Media, Sigma ^e	Rp	2.895	9 Januari 2019 - 30 November 2019	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 3,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
MUFG Bank							
2018	Telkomsel, Infomedia, Metra, TII	Rp	2.350	27 Maret 2019 - 27 September 2019	Bulanan, Semesteran	1 bulan JIBOR + 0,70% - 0,95%; 6 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
DBS							
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	26 Februari 2019	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
2016	Nutech ^g	Rp	17	13 Oktober 2019	Bulanan	10,50% - 11,00%	Tidak ada
2016	Sigma ^{b,c}	US\$	0,02	31 Juli 2019	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha (Catatan 5)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)*</u>	<u>Jatuh tempo fasilitas pinjaman</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>	
UOB	2016 - 2018	MD Media, Finnet ^d	Rp	800	6 April 2019 - 20 Desember 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
HSBC	2018	Sigma	Rp	600	15 Juli 2019	Bulanan	14,34%	Piutang usaha (Catatan 5)
	2018	Sigma	US\$	0,004	15 Juli 2019	Bulanan	13,12%	Piutang usaha (Catatan 5)
	2018	PINS	Rp	300	28 Juni 2019	Triwulanan	3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
SCB	2015	GSD ^e	Rp	100	28 Maret 2019	Bulanan	10,50%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga	2013	GSD ^e	Rp	85	1 Januari 2019	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)

* Disajikan dalam mata uang asal.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 21 Desember 2017.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^c Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Juni 2018.

^e Perpanjangan otomatis bila belum dilunasi.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan, Telkom Infratel dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari DBS sebesar Rp600 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp125 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, TII, Infomedia dan Metra menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari MUFG Bank sebesar Rp500 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp80 miliar.

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	198	206
Obligasi dan wesel bayar	16b	525	-
Utang bank	16c	4.472	4.110
Pinjaman lainnya	16d	294	99
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	807	794
Jumlah		6.296	5.209

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	2018	2017
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	751	892
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.956	8.982
Utang bank	16c	18.753	13.894
Pinjaman lainnya	16d	1.950	1.196
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	2.338	3.010
Jumlah		33.748	27.974

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2020	2021	2022	2023	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	751	198	181	144	127	101
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.956	2.490	477	2.197	-	4.792
Utang bank	16c	18.753	7.653	3.051	2.577	2.813	2.659
Pinjaman lainnya	16d	1.950	404	405	405	415	321
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	2.338	768	670	549	233	118
Jumlah		33.748	11.513	4.784	5.872	3.588	7.991

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	2018		2017	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	4.607	602	5.375	648
	US\$	13	188	17	237
	Rp	-	159	-	213
Jumlah			949		1.098
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(198)		(206)
Bagian jangka panjang			751		892

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	2018		2017	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
2010					
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium term notes</i> atau "MTN")					
MTN I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	262	-	-
Seri B	Rp	-	200	-	-
Seri C	Rp	-	296	-	-
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	264	-	-
Seri B	Rp	-	296	-	-
Seri C	Rp	-	182	-	-
Jumlah			10.495		8.995
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(14)		(13)
Jumlah			10.481		8.982
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			(525)		-
Bagian jangka panjang			9.956		8.982

i. Obligasi

Tahun 2010

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") adalah idAAA (*stable outlook*).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2010 (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

<u>Obligasi</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Penerbit</u>	<u>Tempat pencatatan</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *Broadband, Backbone, Metro & RMJ* serta *IT App & Support* dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode imbalan	Cicilan imbalan per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		742				58	

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditor	Mata uang	2018		2017	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	6.826	-	4.603
Bank Mandiri	Rp	-	4.546	-	1.126
BRI	Rp	-	1.248	-	2.166
Sub-jumlah			12.620		7.895
Pihak ketiga					
MUFG Bank	Rp	-	3.011	-	1.944
	US\$	10	144	-	-
Bank Sindikasi	Rp	-	1.750	-	2.250
	US\$	37	532	-	-
Citibank	Rp	-	1.000	-	-
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp	-	740	-	1.100
UOB Singapore	US\$	49	710	49	664
Sumitomo	Rp	-	661	-	804
Bank CIMB Niaga	Rp	-	462	-	1.726
ANZ	Rp	-	440	-	440
UOB	Rp	-	428	-	500
DBS	Rp	-	379	-	144
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	204	-	249
Exim Bank of Malaysia Berhad	MYR	23	81	37	124
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	3	45	9	128
Lain-lain	Rp	-	33	-	26
	MYR	13	46	15	50
Sub-jumlah			10.666		10.149
Jumlah			23.286		18.044
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(61)		(40)
			23.225		18.004
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			(4.472)		(4.110)
Bagian jangka panjang			18.753		13.894

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

BNI	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
2018	GSD	Rp	182	8	2018 - 2021	Bulanan	8,75%	Piutang usaha (Catatan 5)
2013 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^a , GSD, TLT, Sigma, Dayamitra, Telkom Infratel, Telkom Akses	Rp	9.892	671	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50% - 3,00%; 3 bulan JIBOR + 1,85% - 2,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank Mandiri								
2016 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^{PA} , Balebat, Telkomsat	Rp	8.750	4.035	2017 - 2024	Bulanan, Kuartalan	8,50%, 8,75%, 9,00%, 9,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
2017	GSD, TII, Dayamitra	Rp	845	-	2019 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85%	Tidak ada
BRI								
2013	GSD	Rp	103	17	2014 - 2021	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2017 - 2018	Perusahaan, Dayamitra	Rp	1.200	-	2019 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85%	Tidak ada
MUFG Bank								
2015 - 2018	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra	Rp	3.950	194	2016 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,25%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2018	TII	US\$	0,01	-	2019 - 2023	Kuartalan	3 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Bank Sindikasi								
2015	Perusahaan, GSD	Rp	3.000	500	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Seluruh aset
2018	TII	US\$	0,09	-	2020 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Citibank								
2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	2019 - 2020	Kuartalan	8,50%	Tidak ada
BCA								
2017 - 2018	Metra, Dayamitra, Telkom Infratel	Rp	870	21	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
UOB Singapore								
2016	TII	US\$	0,06	-	2019 - 2024	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,25%	Tidak ada
Sumitomo								
2015 - 2017	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra	Rp	1.150	194	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,15%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
2011	GSD	Rp	78	8	2011 - 2021	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2017	GSD, Metra	Rp	495	28	2018 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
ANZ								
2015 - 2017	GSD, PINS	Rp	750	-	2020 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Aset tetap (Catatan 9)
UOB								
2016	Dayamitra	Rp	500	71	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
DBS								
2016 - 2017	Nutech, Telkomsat	Rp	136	17	2017 - 2022	Bulanan, Semesteran	9,17%, 11,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2017	PINS, Dayamitra	Rp	400	38	2018 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
ICBC								
2017	GSD	Rp	272	45	2017 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
Exim Bank of Malaysia Berhard								
2016	TII	MYR	0,06	0,014	2017 - 2020	Bulanan	ECOF + 1,89%	Tidak ada
JBIC^b								
2013	Perusahaan	US\$	0,03	0,004	2014 - 2019	Semesteran	2,18%	Tidak ada
2013	Perusahaan	US\$	0,03	0,003	2014 - 2019	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,20%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2018, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

^b Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, untuk pengadaan barang dan jasa dari konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom untuk proyek *Southeast Asia Japan Cable System*. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$18,8 juta dan US\$12,5 juta.

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2018.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2018, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2018, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dari Sumitomo, MUFG Bank, ANZ dan sindikasi bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai peminjam ke Sumitomo dan MUFG Bank, perjanjian fasilitas kredit dan mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu peminjam dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan dari Sumitomo, MUFG Bank, dan ANZ masing-masing sebesar Rp82,5 miliar, Rp82,5 miliar dan Rp60 miliar.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp5 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkomsat menandatangani perjanjian kredit dari MUFG Bank, Sumitomo, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan dari MUFG Bank, Sumitomo, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA masing-masing sebesar Rp79 miliar, Rp79 miliar, Rp420 miliar, Rp20 miliar dan Rp564 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, Dayamitra dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BNI, BRI, Bank Mandiri, dan MUFG Bank, masing - masing sebesar Rp825 miliar, Rp700 miliar, Rp775 miliar dan Rp800 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan dari BNI, BRI, Bank Mandiri dan MUFG Bank masing - masing sebesar Rp825 miliar, Rp500 miliar, Rp775 miliar dan RpNihil.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		2018	2017
PT Sarana Multi Infrastruktur			
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	Rp	2.250	1.300
Jumlah		(6)	(5)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)		2.244	1.295
Bagian jangka panjang		(294)	(99)
		1.950	1.196

i. Dayamitra

PT Sarana Multi Infrastruktur	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	50	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	-	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+ 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
2. *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak lebih dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya (lanjutan)

ii. Perusahaan

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	Semesteran (2019-2023)	8,35%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	2018	2017
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	17.899	18.944
GSD	212	186
Metra	171	115
TII	111	172
Jumlah	18.393	19.417
	2018	2017
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	8.937	10.637
Metra	11	(82)
TII	7	6
GSD	(8)	(5)
Jumlah	8.947	10.556

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan laporan posisi keuangan

	2018	2017
Aset lancar	16.836	21.098
Aset tidak lancar	65.814	64.650
Liabilitas jangka pendek	(20.737)	(23.031)
Liabilitas jangka panjang	(10.767)	(8.587)
Jumlah ekuitas	51.146	54.130
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	33.247	35.186
Kepentingan nonpengendali	17.899	18.944

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	2018	2017
Pendapatan	89.246	93.217
Beban operasi	(55.286)	(53.183)
Pendapatan lain-lain - bersih	124	380
Laba sebelum pajak penghasilan	34.084	40.414
Beban pajak penghasilan - bersih	(8.548)	(10.018)
Laba tahun berjalan dari operasi yang masih berlanjut	25.536	30.396
Penghasilan komprehensif lain - bersih	356	(392)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	25.892	30.004
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	8.937	10.637
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	10.105	12.334

Ringkasan laporan arus kas

	2018	2017
Kegiatan operasi	36.848	39.564
Kegiatan investasi	(16.095)	(13.984)
Kegiatan pendanaan	(24.867)	(34.720)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(4.114)	(9.140)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

Keterangan	2018		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.560	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.944.921.880	4,99	247
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	654.505	0	0
Rinaldi Firmansyah	454.113	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	1.683.359	0	0
Herdy Rosadi Harman	1.514.720	0	0
Abdus Somad Arief	1.515.022	0	0
Dian Rachmawan	1.575.562	0	0
Harry Mozarta Zen	689.492	0	0
David Bangun	1.000	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.506.852.846	42,92	2.126
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	2017		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.560	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	6.078.374.280	6,14	304
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	414.157	0	0
Hadiyanto	875.297	0	0
Rinaldi Firmansyah	147.100	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	920.349	0	0
Herdy Rosadi Harman	828.012	0	0
Abdus Somad Arief	828.314	0	0
Dian Rachmawan	888.854	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	41.376.586.676	41,77	2.069
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	1.737.779.800	0	87
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya (Catatan 20)	544	544
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya (Catatan 20)	576	576
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	478	478
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya (Catatan 20)	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya (Catatan 20)	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya (Catatan 20)	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Pengurangan tambahan modal disetor sebagai akibat penarikan modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	(2.454)	-
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(22)	-
Jumlah bersih	<u>2.455</u>	<u>4.931</u>

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	BAPEPAM - LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Mutasi modal saham yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

	2018			2017		
	Jumlah saham	%	Rp	Jumlah saham	%	Rp
Saldo awal	1.737.779.800	1,72	2.541	1.737.779.800	1,72	2.541
Penarikan kembali atas modal saham yang diperoleh kembali	(1.737.779.800)	(1,72)	(2.541)	-	-	-
Saldo akhir	-	-	-	1.737.779.800	1,72	2.541

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pelaksanaan pembelian kembali modal saham tahap IV.

Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 283.085.460 saham (setara dengan 1.415.427.300 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV).

Selanjutnya pada tahun 2012, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 237.270.500 saham (setara dengan 1.186.352.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV) sebesar Rp1.744 miliar. Total saham hasil pembelian kembali tahap IV adalah sebanyak 2.601.779.800 lembar saham.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali tahap III untuk digunakan sebagai pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Program ("ESOP") tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 211.290.500 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.056.452.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap I yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.368 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih atas nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp544 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 215.000.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap II yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.541 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp576 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 4.472.600 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 22.363.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan sisa saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap III yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp68 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp36 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Perusahaan telah mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali Tahap I pada tahun 2013, saham hasil pembelian kembali Tahap II pada tahun 2014, dan saham hasil pembelian kembali Tahap III sepenuhnya pada tahun 2015.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 172.800.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 864.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali sebagian dari program pembelian kembali saham tahap IV yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp3.259 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp1.996 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 27 April 2018 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No.54 tanggal 27 April 2018 oleh Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan modal saham yang diperoleh kembali sejumlah 1.737.779.800 lembar saham dengan biaya perolehan sebesar Rp2.541 miliar melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 100.799.966.400 lembar saham menjadi 99.062.216.600 lembar saham (berkurang senilai Rp87 miliar) (Catatan 18).

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	2018	2017
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	673	527
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	48	58
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	53
Jumlah	507	387

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN

	2018	2017
Pendapatan telepon		
Telepon bergerak	30.431	37.246
Telepon tidak bergerak	5.888	6.665
Jumlah pendapatan telepon	36.319	43.911
Pendapatan interkoneksi	5.463	5.175
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Internet dan data selular	45.154	37.961
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	19.454	15.085
<i>Short Messaging Services</i> ("SMS")	9.185	13.192
TV berbayar	2.508	1.944
Lain-lain	852	353
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	77.153	68.535
Pendapatan jaringan	1.723	1.873
Pendapatan lainnya		
Penjualan periferal	1.851	2.292
CPE dan terminal	1.450	536
<i>Call center service</i>	1.052	970
Sewa menara telekomunikasi	909	796
<i>E-health</i>	563	470
<i>E-payment</i>	449	505
Lain-lain	3.852	3.193
Jumlah pendapatan lainnya	10.126	8.762
Jumlah pendapatan	130.784	128.256

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Pendapatan bruto	46.672	39.111
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(1.518)	(1.150)
Pendapatan neto	45.154	37.961

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Gaji dan tunjangan	8.077	7.821
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	3.292	3.339
Beban pensiun (Catatan 29)	1.120	1.700
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 29)	335	276
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 30)	161	255
Beban manfaat karyawan lainnya (Catatan 29)	113	62
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 29)	32	42
Lain-lain	48	34
Jumlah	<u>13.178</u>	<u>13.529</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Operasi dan pemeliharaan	25.214	19.929
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 34c.i)	5.473	4.276
Sewa sirkit dan CPE	5.125	5.255
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	2.297	2.249
Beban pokok penjualan handset (Catatan 6)	1.860	1.544
Listrik, gas, dan air	1.051	1.037
Beban pokok penjualan kartu SIM dan vaucer (Catatan 6)	765	914
Sewa menara	480	472
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	413	301
Asuransi	193	294
Lain-lain	920	332
Jumlah	<u>43.791</u>	<u>36.603</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban umum	1.792	1.449
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 5d)	1.724	1.494
Jasa profesional	823	498
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	463	531
Perjalanan	415	475
Rapat	233	241
Sumbangan sosial	181	197
Beban penagihan	157	135
Lain-lain	349	240
Jumlah	<u>6.137</u>	<u>5.260</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	494	610
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1.119	1.338
Entitas anak:		
PPh Badan	406	174
PPN	1.027	1.871
Jumlah tagihan restitusi pajak	<u>3.046</u>	<u>3.993</u>
Bagian jangka pendek	<u>(596)</u>	<u>(908)</u>
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>2.450</u>	<u>3.085</u>

b. Pajak dibayar di muka

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perusahaan:		
PPh		
PPh 22 - Pembelian barang	-	1
PPh 23 - Penyerahan jasa	63	44
PPN	1.048	629
Entitas anak:		
PPh Badan	14	1
PPh 23 - Penyerahan jasa	1	17
PPN	<u>2.765</u>	<u>2.008</u>
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>3.891</u>	<u>2.700</u>
Bagian jangka pendek	<u>(2.749)</u>	<u>(1.947)</u>
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>1.142</u>	<u>753</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	18	26
Pasal 21 - PPh pribadi	47	81
Pasal 22 - Pembelian barang	3	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	36	29
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	1	1
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	3	1
PPN WAPU	334	372
	<u>442</u>	<u>513</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	75	85
Pasal 21 - PPh pribadi	113	129
Pasal 22 - Pembelian barang	5	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	110	115
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	14	37
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	7	303
Pasal 29 - PPh Badan	389	763
PPN	25	842
	<u>738</u>	<u>2.277</u>
Jumlah utang pajak	<u>1.180</u>	<u>2.790</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kini		
Perusahaan	236	586
Entitas anak	9.196	10.771
	<u>9.432</u>	<u>11.357</u>
Tangguhan		
Perusahaan	(103)	(1.603)
Entitas anak	97	204
	<u>(6)</u>	<u>(1.399)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>9.426</u>	<u>9.958</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	36.405	42.659
Dikurangi: pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(1.277)	(1.491)
	<u>35.128</u>	<u>41.168</u>
Pajak dihitung pada tarif Perusahaan 20%	7.026	8.234
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	1.753	2.046
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	398	761
Pajak penghasilan final	60	591
Pembalikan aset pajak tangguhan	(2)	(6)
Aset pajak tangguhan atas penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan	-	(1.796)
Lain-lain	191	128
Beban pajak penghasilan bersih	<u>9.426</u>	<u>9.958</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	36.405	42.659
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	25.933	21.445
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	62.338	64.104
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(43.322)	(43.702)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	19.016	20.402
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(425)	(462)
	<u>18.591</u>	<u>19.940</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	193	1.030
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	133	985
Pendapatan instalasi tangguhan	92	(4)
Realisasi provisi nilai aset	-	(1.012)
Penyisihan beban karyawan	(532)	188
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(180)	(3.120)
Sewa pembiayaan	(10)	(3)
Penyisihan lain-lain	349	(76)
Jumlah perbedaan temporer bersih	45	(2.012)
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	335	276
Imbalan karyawan	215	264
Sumbangan	123	194
Keuntungan pengalihan bisnis ke entitas sepengendali	-	86
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(17.852)	(20.635)
Lain-lain	(71)	1.026
Jumlah perbedaan tetap bersih	(17.250)	(18.789)
Kompensasi rugi fiskal	(986)	-
Laba (rugi) kena pajak	400	(861)
Beban pajak kini	80	-
Beban pajak final	57	586
Beban pajak kini atas pemeriksaan pajak	99	-
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	236	586
Beban pajak kini - entitas anak	9.196	10.771
Jumlah beban pajak penghasilan kini	9.432	11.357

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan dibawah Peraturan Pemerintah ("PP") No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan PPh Badan di atas dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2018 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Terdapat perbedaan antara jumlah PPh badan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dikarenakan penyesuaian atas hasil pemeriksaan tahun 2016.

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Pada tanggal 15 November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk PPN masa pajak Januari sampai dengan September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Pada tanggal 20 Januari 2014, Perusahaan mengajukan keberatan dan di bulan Desember 2014, Otoritas Pajak menerbitkan keputusan penolakan keberatan. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN senilai Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar) dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 12 Maret 2015, Perusahaan telah mengajukan banding.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas proses banding PPN Interkoneksi tersebut, dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga masuk kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan. Pada bulan September 2017, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp115 miliar dan saldo tersisa senilai Rp5 miliar telah dikompensasikan sebagai pembayaran Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk PPh 21 dan SKPKB untuk PPN WAPU dan PPN Jasa Luar Negeri.

Pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 23 November 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali. Sebagai tanggapan atas putusan memori peninjauan kembali, pada tanggal 23 November 2017 dan 21 Desember 2017, Perusahaan telah mengirimkan kontra memori peninjauan kembali atas perkara PPN Interkoneksi ini. Pada bulan September dan November 2018, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak masa Juni s.d. Agustus dan November 2007 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Otoritas Pajak dan memperkuat putusan pengadilan pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, peninjauan kembali untuk masa pajak Mei 2007 masih dalam proses.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB dari Otoritas Pajak untuk tahun fiskal 2011. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan. Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas banding tersebut, dan dalam putusannya, dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga termasuk sebagai kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Sedangkan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, untuk itu pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan mengajukan memori peninjauan kembali. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 13 November 2018, Perusahaan mengirimkan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 kepada Mahkamah Agung. Pada bulan November 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali masih dalam proses.

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012, dan atas pemeriksaan tersebut telah menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPh atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar) dan SKPKB PPh pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35 miliar terkait Perhitungan Kembali Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi *International Incoming Call*, Rp613 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Atas bagian lainnya, pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan.

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp 0,6 juta) dan kurang bayar PPN atas pemungutan pajak senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan memutuskan untuk menerima keputusan tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk Pajak penghasilan dan PPh Badan dengan rincian kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4(2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar) dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk PPN Masa Januari s.d. Desember 2012 dengan total Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding masih dalam proses.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015 atas lebih bayar pajak PPh Badan senilai Rp414 miliar. Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN Dalam Negeri senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4 miliar), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar (termasuk denda Rp17 miliar). Perusahaan menerima STP atas PPN Dalam Negeri senilai Rp34 miliar, PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp7 miliar dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016. Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN atas Pemungutan Pajak, serta STP PPN senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak untuk SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar. Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016 atas lebih bayar PPh Badan senilai Rp114,4 miliar. Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh 26 senilai Rp557 juta (termasuk denda Rp180 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp923 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, PPh 26, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN Pemungutan oleh Pemungut senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo sebesar Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN atas Pemungut Pajak senilai Rp7,1 miliar, PPh 23 senilai Rp556 juta dan PPh 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait Interkoneksi *International Incoming Call* senilai Rp151 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses keberatan masih dalam proses.

Pada tanggal 11 September 2017 dan 9 Januari 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa Pajak Desember dan November 2014 untuk klaim restitusi Lebih Bayar Pembetulan SPT PPN masa pajak Desember dan November 2014, masing-masing senilai Rp129 miliar dan Rp86,7 miliar. Pada tanggal 25 Juli dan 7 September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB untuk masa pajak Desember dan November 2014. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp122,5 miliar untuk masa pajak Desember 2014. Pada bulan Oktober 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp80,8 miliar dan Rp3,6 miliar yang telah dikompensasikan sebagai pembayaran SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean masa pajak Maret, April dan Juni 2015, STP PPN masa November 2014 dan surat ketetapan pajak lainnya.

Pada tanggal 6 November 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2017. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan *withholding tax* tahun 2006 dengan total Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan Pemotongan Pajak yang menguntungkan tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dijamin sampai Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Agustus 2016, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan uji materi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN sebesar Rp108 miliar. Kontra memorandum untuk pengujian uji materi telah dikirim pada tanggal 14 September 2016. Pada bulan April 2017, Otoritas Pajak telah menjamin klaim Telkomsel atas pendapatan bunga yang akan dikompensasikan ke pembayaran cicilan PPh Badan untuk periode April 2017. Pada bulan Juli 2018, Telkomsel menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 21 April 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait keputusan Pengadilan Pajak yang menerima permintaan Telkomsel untuk membatalkan STP atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8,4 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima surat keputusan tersebut dari Mahkamah Agung dan telah dibayarkan ke kas negara di bulan Juni 2017.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 senilai Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada bulan Juli 2016, Telkomsel mengakui denda pajak senilai Rp15,7 miliar.

Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 9 Mei 2017, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak banding Telkomsel, sehingga atas kurang bayar PPN tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2017. Pada tanggal 19 Juli 2017, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali tahap kedua atas keputusan Mahkamah Agung. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan banding Telkomsel.

Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

Pada tanggal 28 Juli 2016 dan 24 Maret 2017, Telkomsel telah menerima surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

f. Insentif pajak

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memanfaatkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V dalam bentuk insentif pajak untuk penilaian kembali aset tetap sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015 jo PMK No.29/PMK.03/2016. Sesuai dengan PMK tersebut, Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada DJP dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa PPh yang bersifat final berkisar 3%-6% atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Insentif pajak (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan telah mengajukan permohonan penilaian kembali aset tetap berdasarkan hasil perkiraan penilaian kembali sendiri dan telah melunasi PPh Final terkait sebesar Rp750 miliar. Sesuai PMK, nilai aset tetap hasil perkiraan penilaian kembali sendiri harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, DJP dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan telah menunjuk KJPP untuk melakukan penilaian kembali aset tetap Perusahaan.

Perusahaan telah menyampaikan Dokumen Penilaian Kembali Aset Tetap Tahap 1 beserta ke DJP pada tanggal 29 September 2016. Pada tanggal 10 November 2016, DJP telah mengeluarkan persetujuan atas Penilaian Kembali Aset Tetap senilai Rp7.078 miliar dengan PPh Final sebesar Rp212 miliar.

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan kembali permohonan penilaian kembali aset tetap untuk Tahap 2 ke DJP dan mengharapkan mendapatkan tarif pajak sebesar 6%. Dalam permohonannya, Perusahaan mengestimasi kenaikan nilai aset sebesar Rp8.961 miliar dan PPh Final sebesar Rp538 miliar. Pada tahun 2017, Perusahaan telah menerima laporan hasil penilaian kembali aset dari KJPP. Berdasarkan laporan, terdapat kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp8.982 miliar dengan PPh Final sebesar Rp540 miliar. Atas kenaikan PPh Final tersebut, Perusahaan telah melunasi kekurangan PPh Final sebesar Rp2 miliar pada tanggal 22 September 2017 dan 15 November 2016. Pada tanggal 21 November 2017, DJP telah mengeluarkan persetujuan atas Penilaian Kembali Aset Tetap senilai Rp8.982 miliar dengan PPh Final sebesar Rp540 miliar.

Penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan ini menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, karena dasar pengenaan pajak atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat secara akuntansi. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomik akan mengalir ke Perusahaan dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ketika jumlah tercatat aset tersebut terpulihkan.

Pada tahun 2016 dan 2017, Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan sebesar masing-masing Rp1.415 miliar dan Rp1.796 miliar atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali tahap 1 dan tahap 2 yang telah disetujui oleh DJP di atas nilai sisa buku fiskal semula.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2018
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	1.102	27	(466)	-	663
Provisi penurunan nilai piutang	594	38	-	-	632
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	240	180	-	-	420
Provisi imbalan karyawan	247	(32)	-	-	215
Pendapatan instalasi tangguhan	74	18	-	-	92
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	43	36	-	-	79
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(1)	10	-	-	9
Rugi fiskal	172	(172)	-	-	-
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.471</u>	<u>105</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.110</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	1	(2)	-	-	(1)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(10)</u>	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>2.461</u>	<u>103</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.098</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>343</u>	<u>76</u>	<u>(8)</u>	<u>(5)</u>	<u>406</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	677	83	(119)	-	641
Provisi penurunan nilai piutang	184	86	-	-	270
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>861</u>	<u>169</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>911</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(561)	(335)	-	-	(896)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(552)	(64)	-	-	(616)
Aset takberwujud	(225)	107	-	-	(118)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.338)</u>	<u>(292)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.630)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>(477)</u>	<u>(123)</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>(719)</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(456)</u>	<u>(50)</u>	<u>(5)</u>	<u>(22)</u>	<u>(533)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(933)</u>	<u>(173)</u>	<u>(124)</u>	<u>(22)</u>	<u>(1.252)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.804</u>	<u>179</u>	<u>(474)</u>	<u>(5)</u>	<u>2.504</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2016	(Dibebankan dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dibebankan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	Dibebankan dikreditkan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2017
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	563	197	342	-	1.102
Provisi penurunan nilai piutang	388	206	-	-	594
Provisi imbalan karyawan	209	38	-	-	247
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(772)	1.012	-	-	240
Rugi fiskal	-	172	-	-	172
Pendapatan instalasi tangguhan	75	(1)	-	-	74
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	69	(26)	-	-	43
Sewa pembiayaan	1	(0)	-	-	1
Jumlah aset pajak tangguhan	533	1.598	342	-	2.473
Liabilitas pajak tangguhan:					
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(11)	10	-	-	(1)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(22)	10	-	-	(12)
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	511	1.608	342	-	2.461
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	258	(20)	9	96	343
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	478	68	131	-	677
Provisi penurunan nilai piutang	143	41	-	-	184
Jumlah aset pajak tangguhan	621	109	131	-	861
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(549)	(12)	-	-	(561)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(482)	55	-	(125)	(552)
Aset takberwujud	(48)	(177)	-	-	(225)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.079)	(134)	-	(125)	(1.338)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(458)	(25)	131	(125)	(477)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(287)	(164)	12	(17)	(456)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(745)	(189)	143	(142)	(933)
Aset pajak tangguhan - bersih	769	1.588	351	96	2.804

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp31.461 miliar dan Rp31.928 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

h. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2018, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 26 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

27. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp18.032 miliar dan Rp22.145 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp182,03 dan Rp223,55 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 28 tertanggal 21 April 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2016 masing-masing sebesar Rp11.611 miliar (Rp 117,21 per lembar saham) dan Rp1.935 miliar (Rp19,54 per lembar saham).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 54 tertanggal 27 April 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2017 masing-masing sebesar Rp13.287 miliar (Rp134,13 per lembar saham) dan Rp3.322 miliar (Rp33,53 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut

	Catatan	2018	2017
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	1.057	1.540
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	6	1.076
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	1.830	2.384
Telkomsel	29a.ii	1.541	1.839
Telkomsat		0	0
MD Media		0	0
Infomedia		-	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		4.434	6.839
Imbalan kesehatan pasca kerja	29b	195	2.419
Imbalan pasca kerja lainnya	29c	419	510
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	507	427
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		5.555	10.195

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Catatan	2018	2017
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	511	557
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	69	657
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	198	239
Telkomsel	29a.ii	342	247
MD Media		0	0
Infomedia		0	0
Telkomsat		0	0
Beban pensiun	23	1.120	1.700
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	23,29b	335	276
Beban imbalan pasca kerja lainnya	23,29c	32	42
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	23,29d	113	62
Jumlah		1.600	2.080

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Catatan	2018	2017
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	1.236	(1.154)
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	934	(419)
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	137	(100)
Telkomsel	29a.ii	514	(530)
MD Media		0	(2)
Infomedia		0	(1)
Telkomsat		0	0
Beban imbalan kesehatan pasca kerja	29b	2.559	(551)
Beban imbalan pasca kerja lainnya	29c	24	(40)
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	14	(72)
Sub-jumlah		5.418	(2.869)
Pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku	26g	(598)	494
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti - bersih		4.820	(2.375)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke dana pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 untuk program pensiun manfaat pasti:

	2018	2017
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	22.354	18.849
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	384	366
Beban jasa lalu - perubahan program	-	94
Beban bunga	1.459	1.454
Kontribusi peserta program pensiun (Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	38	41
Pembayaran pensiun	(2.691)	2.862
	(1.423)	(1.312)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	20.121	22.354

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	2018	2017
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	20.814	19.046
Pendapatan bunga	1.357	1.387
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.455)	1.709
Kontribusi peserta program pensiun	38	41
Pembayaran pensiun	(1.423)	(1.312)
Penyisihan manfaat tambahan	(205)	-
Beban administrasi program	(62)	(57)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	19.064	20.814
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.057	1.540

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset program terdiri dari:

	2018		2017	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	873	-	1.481	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.456	-	1.463	-
Barang konsumen	1.336	-	1.411	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	530	-	656	-
Konstruksi, properti dan real estat	199	-	363	-
Industri dasar dan bahan kimia	124	-	115	-
Perdagangan, jasa dan investasi	420	-	388	-
Tambang	112	-	92	-
Agrikultur	55	-	46	-
Industri lainnya	362	-	377	-
Reksadana berbasis saham	1.336	-	1.233	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	5.267	-	5.428
Obligasi pemerintah	6.166	-	6.968	-
Reksadana	54	-	54	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	288	-	237
Properti	-	178	-	188
Lainnya	-	308	-	314
Jumlah	13.023	6.041	14.647	6.167

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUIN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp372 miliar dan Rp469 miliar, yang mewakili 1,95% dan 2,25% dari total aset program pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp314 miliar dan Rp340 miliar mewakili masing-masing 1,65% dan 1,64% dari total aset per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(158) miliar dan Rp3.039 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2018, RKD Dapen dibawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan memberikan manfaat lain berupa manfaat tambahan di tahun 2017 sebesar Rp4,5 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp2,25 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun)	1.540	(197)
Beban pensiun berkala bersih	548	583
Penyisihan manfaat tambahan	205	-
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(2.691)	2.862
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1.455	(1.708)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.057	1.540

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban jasa	384	366
Beban jasa lalu - perubahan program	-	94
Beban administrasi program	62	57
Beban bunga bersih	102	66
Beban pensiun berkala bersih	548	583
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(37)	(26)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	511	557

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	329	163
Perubahan asumsi finansial	(3.020)	2.699
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1.455	(1.708)
Jumlah bersih	(1.236)	1.154

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang peraturan dana pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan RKD diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

	2018	2017
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	1.076	-
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa lalu	-	657
Beban bunga	69	-
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(948)	419
Pembayaran pensiun	(93)	-
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	104	1.076
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	-	-
Penyisihan manfaat tambahan	205	-
Pengembalian atas aset program pensiun	(14)	-
Pembayaran manfaat pensiun	(93)	-
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	98	-
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	6	1.076

Pada tanggal 31 Desember 2018 belum terdapat aset program manfaat tambahan. Aset program baru akan dicatat sesuai dengan cadangan dana manfaat tambahan yang akan ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Perubahan liabilitas manfaat tambahan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Liabilitas manfaat tambahan pensiun pada awal tahun	1.076	-
Beban jasa lalu	-	657
Beban pensiun berkala bersih	69	-
Penyisihan manfaat tambahan	(205)	-
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(948)	419
Pengembalian aset program pensiun	14	-
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	6	1.076

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

Komponen beban manfaat tambahan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Beban jasa lalu	-	657
Beban bunga	69	-
Beban pensiun	69	657

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(773)	-
Perubahan asumsi finansial	(175)	419
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	14	-
Jumlah	(934)	419

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat pengembalian investasi	9,30%-10,00%	9,50%-10,25%
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat suku bunga aktuarial pendanaan	9,25%-9,50%	9,25%-9,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13 miliar dan Rp10 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.384	2.507
Beban jasa	54	51
Beban bunga bersih	144	188
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(137)	100
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(615)	(462)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	1.830	2.384

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Beban jasa	54	51
Beban bunga bersih	144	188
Jumlah	198	239

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	27	19
Perubahan asumsi demografik	(21)	-
Perubahan asumsi finansial	(143)	81
Jumlah bersih	(137)	100

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,00%-8,25%	6,00%-6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya Rp125 miliar dan Rp131 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	2.928	2.034
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	213	149
Beban bunga	203	167
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(583)	584
Pembayaran pensiun	(27)	(6)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>2.734</u>	<u>2.928</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	1.089	841
Pendapatan bunga	74	69
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(68)	54
Kontribusi pemberi kerja	125	131
Pembayaran pensiun	(27)	(6)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	1.193	1.089
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.541	1.839

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.839	1.193
Beban manfaat pensiun	342	247
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(583)	584
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	68	(54)
Kontribusi pemberi kerja	(125)	(131)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.541	1.839

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban jasa	213	149
Beban bunga bersih	129	98
Jumlah	342	247

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	192	(77)
Perubahan asumsi finansial	(774)	661
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	68	(54)
Jumlah bersih	(514)	530

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan laporan tertanggal masing-masing 14 Februari 2019 dan 8 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,25%	7,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	15.448	13.357
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	1.102	1.115
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(3.641)	1.460
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	<u>(486)</u>	<u>(484)</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	<u>12.423</u>	<u>15.448</u>
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	13.029	11.765
Pendapatan bunga	927	979
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.082)	909
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(486)	(484)
Beban administrasi program	<u>(160)</u>	<u>(140)</u>
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	<u>12.228</u>	<u>13.029</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	<u>195</u>	<u>2.419</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset program terdiri dari:

	2018		2017	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.115	-	1.354	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	799	-	835	-
Industri keuangan	799	-	840	-
Konstruksi	190	-	254	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	332	-	350	-
Grosir	177	-	137	-
Tambang	77	-	65	-
Industri lainnya:				
Jasa	60	-	38	-
Agrikultur	32	-	35	-
Bioteknologi dan industri farmasi	85	-	68	-
Lainnya	3	-	1	-
Reksadana berbasis ekuitas	1.204	-	1.113	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.020	-	7.642	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	335	-	297
Jumlah	11.893	335	12.732	297

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp249 miliar dan Rp265 miliar yang merupakan 2,03% dan 2,04% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(315) miliar dan Rp1.748 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	2.419	1.592
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala (Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	335	276
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(3.641)	1.460
	1.082	(909)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	195	2.419

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban administrasi program	160	141
Beban bunga bersih	175	135
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	<u>335</u>	<u>276</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(1.100)	(1.198)
Perubahan asumsi finansial	(2.541)	2.658
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1.082	(909)
Jumlah bersih	<u>(2.559)</u>	<u>551</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,75%	7,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2018	2018
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	510	502
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	6	6
Beban bunga bersih	26	36
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(24)	40
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(99)	(74)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir tahun	419	510

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Beban jasa	6	6
Beban bunga bersih	26	36
Jumlah	32	42

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	40	10
Perubahan asumsi demografik	(34)	-
Perubahan asumsi finansial	(30)	30
Jumlah	(24)	40

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat diskonto	8,00%	5,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp507 miliar dan Rp427 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp113 miliar dan Rp62 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 23). (Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar Rp(14) miliar dan Rp72 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2018 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded			
Dalam 10 tahun kedepan	16.370	-	948	2.498	5.620	485
Dalam 10-20 tahun	20.349	-	160	7.880	6.913	91
Dalam 20-30 tahun	16.207	20	29	6.680	6.217	39
Dalam 30-40 tahun	9.400	38	9	1.580	3.193	3
Dalam 40-50 tahun	3.383	30	-	-	661	-
Dalam 50-60 tahun	644	50	-	-	22	-
Dalam 60-70 tahun	62	101	-	-	0	-
Dalam 70-80 tahun	2	-	-	-	-	-

Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti

9,11 tahun 9,11 tahun 3,97 tahun 10,58 tahun 17,41 tahun 3,13 tahun

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada tahun 2018 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1% Jumlah peningkatan (penurunan)	Penurunan 1% (penurunan)	Peningkatan 1% Jumlah peningkatan (penurunan)	Penurunan 1% (penurunan)
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.568)	1.832	275	(286)
Manfaat tambahan	(2)	(1)	-	-
Tidak didanai	(41)	38	42	(45)
Telkomsel	(497)	562	294	(276)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.428)	1.815	1.783	(1.508)
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	13	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp852 miliar dan Rp758 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp161 miliar dan Rp255 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 23).

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
INTI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi
Bank milik negara BNI	Entitas sepengendali Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan
Bank Mandiri	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Pegadaian ("Pegadaian")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Balai Pustaka ("Balai Pustaka")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia ("Garuda Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Angkasa Pura ("Angkasa Pura")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Perum Peruri ("Peruri")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kereta Api Indonesia ("KAI")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap
PT Mandiri Manajemen Investasi Bahana TCW	Entitas sepengendali Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur Indonusa	Entitas sepengendali	Biaya pendanaan
Teltranet	Entitas asosiasi	Beban <i>Pay TV</i>
Tiphone	Entitas asosiasi	Beban CPE
PT Poin Multi Media Nusantara ("POIN")	Entitas berelasi lainnya	Distribusi kartu SIM dan vauzer Prabayar Pembelian <i>handset</i>
PT Perdana Mulia Makmur ("PMM")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Beban pengobatan
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan vauzer Prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi dan distribusi kartu SIM dan vauzer Prabayar
PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap
Direksi Komisaris	Personil manajemen kunci Personil pengawas	Gaji dan fasilitas Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2018, Grup mencatat adanya pengurangan nilai provisi yang diakui selama tahun berjalan dari pihak berelasi sebesar Rp(150) miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	258	0,20	280	0,22
Entitas sepengendali				
Indosat	1.002	0,77	1.789	1,39
BRI	397	0,30	237	0,18
Pegadaian	228	0,17	115	0,09
BNI	188	0,14	105	0,08
Pertamina	183	0,14	94	0,07
BTN	179	0,14	129	0,10
Bank Mandiri	173	0,13	157	0,12
Peruri	120	0,09	-	-
Angkasa Pura	114	0,09	-	-
Garuda Indonesia	105	0,08	55	0,04
KAI	83	0,06	18	0,01
Balai Pustaka	81	0,06	-	-
Lain-lain	696	0,53	682	0,54
Sub-jumlah	3.807	2,70	3.818	1,89
Entitas berelasi lainnya	73	0,06	31	0,02
Entitas asosiasi	55	0,04	65	0,05
Jumlah	3.935	3,00	4.084	3,17

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	2.596	2,79	2.269	2,69
Indosat	933	1,00	890	1,06
Jasindo	349	0,38	168	0,20
Lain-lain	189	0,20	68	0,08
Sub-jumlah	4.067	4,37	3.395	4,03
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	916	0,98	813	0,96
PMM	850	0,91	404	0,48
POIN	850	0,91	405	0,48
Kopegtel	836	0,90	713	0,85
Yakes	128	0,14	139	0,16
Lain-lain	190	0,20	81	0,10
Sub-jumlah	3.770	4,04	2.555	3,03
Entitas asosiasi				
Indonusa	306	0,33	264	0,31
Teltranet	181	0,19	123	0,15
Lain-lain	11	0,01	38	0,04
Sub-jumlah	498	0,53	425	0,50
Jumlah	8.335	8,94	6.375	7,56

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	596	58,78	850	59,27
Lain-lain	6	0,59	35	2,44
Jumlah	602	59,37	885	61,71

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
BIAYA PENDANAAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	41	1,17	54	1,95
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	1.140	32,51	819	29,58
Sarana Multi Infrastruktur	110	3,14	94	3,39
Jumlah	1.291	36,82	967	34,92

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 9)				
Entitas sepengendali				
INTI	137	0,43	203	0,79
Lain-lain	41	0,13	93	0,33
Sub-jumlah	178	0,56	296	1,12
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	144	0,46	130	0,41
Bangtelindo	135	0,43	64	0,20
Lain-lain	193	0,61	189	0,64
Sub-jumlah	472	1,50	359	1,25
Jumlah	650	2,06	655	2,37

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
DISTRIBUSI KARTU SIM DAN VAUCER				
Entitas berelasi lainnya				
Tiphone	4.390	3,36	3.888	3,03
Kisel	4.221	3,23	4.181	3,26
Gratika	474	0,36	408	0,32
Jumlah	9.085	6,95	8.477	6,61

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 3)	13.205	6,40	17.417	8,78
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	471	0,23	1.153	0,58
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	2.126	1,03	1.545	0,78
d. Aset lancar lainnya (Catatan 7)	159	0,08	126	0,06
e. Aset tidak lancar lainnya (Catatan 10)	44	0,02	55	0,03
	2018	% terhadap jumlah liabilitas	2017	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 12)	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	2	0,00	29	0,03
Entitas sepengendali				
Indosat	122	0,14	225	0,26
BUMN	294	0,33	102	0,12
Sub-jumlah	416	0,47	327	0,38
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	279	0,31	209	0,24
Lain-lain	296	0,33	329	0,38
Sub-jumlah	575	0,64	538	0,62
Jumlah	993	1,11	869	1,00
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 13)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	7	0,01	9	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	86	0,10	113	0,13
Bank milik negara	61	0,07	36	0,04
Sub-jumlah	147	0,17	149	0,17
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	183	0,21	235	0,27
Lain-lain	13	0,01	1	0,00
Jumlah	350	0,40	394	0,46
h. Uang muka pelanggan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,02	19	0,02
Entitas sepengendali				
PLN	12	0,01	11	0,01
Jumlah	31	0,03	30	0,03
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	956	1,08	1.297	1,50
j. Pinjaman penerusan (Catatan 16a)	949	1,07	1.098	1,27
k. Utang bank jangka panjang (Catatan 16c)	12.620	14,19	7.895	9,14
l. Pinjaman lainnya (Catatan 16d)	2.244	2,52	1.295	1,50

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 16a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vauzer pulsa isi ulang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2018		2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	360	0,39%	175	0,21%
Dewan Komisaris	166	0,18%	65	0,08%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

32. SEGMENT OPERASI

Pada tahun 2017, Manajemen melakukan penataan kembali pengelolaan portofolio bisnis Grup dari pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan menjadi pendekatan berbasis *Customer Facing Unit* ("CFU") agar Grup dapat berfokus pada pasar pelanggan yang lebih spesifik. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi Grup untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis CFU.

Grup memiliki empat segmen dilaporkan utama, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise* dan WIB. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, data, internet, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2018					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	85.338	13.891	21.054	10.084	130	130.497	287	130.784
Pendapatan antar segmen	3.880	2.290	17.995	16.678	886	41.729	(41.729)	-
Jumlah pendapatan segmen	89.218	16.181	39.049	26.762	1.016	172.226	(41.442)	130.784
Beban								
Beban eksternal	(40.041)	(11.739)	(21.717)	(14.624)	(1.042)	(89.163)	(2.776)	(91.939)
Beban antar segmen	(15.408)	(3.792)	(16.116)	(6.010)	(31)	(41.357)	41.357	-
Jumlah beban segmen	(55.449)	(15.531)	(37.833)	(20.634)	(1.073)	(130.520)	38.581	(91.939)
Hasil segmen	33.769	650	1.216	6.128	(57)	41.706	(2.861)	38.845
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(14.373)	(6.958)	(5.325)	(6.321)	(18)	(32.995)	(625)	(33.620)
Penyusutan dan amortisasi	(13.095)	(3.060)	(2.128)	(3.146)	(21)	(21.450)	44	(21.406)
Provisi diakui selama periode berjalan	(438)	(438)	(764)	(71)	(5)	(1.716)	(8)	(1.724)

	2017					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	90.073	11.105	19.130	7.439	126	127.873	383	128.256
Pendapatan antar segmen	3.086	287	16.801	15.305	602	36.081	(36.081)	-
Jumlah pendapatan segmen	93.159	11.392	35.931	22.744	728	163.954	(35.698)	128.256
Beban								
Beban eksternal	(39.452)	(10.360)	(20.653)	(12.333)	(979)	(83.777)	(572)	(84.349)
Beban antar segmen	(14.382)	(1.563)	(15.027)	(5.611)	(70)	(36.653)	36.653	-
Jumlah beban segmen	(53.834)	(11.923)	(35.680)	(17.944)	(1.049)	(120.430)	36.081	(84.349)
Hasil segmen	39.325	(531)	252	4.800	(321)	43.525	382	43.907
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(15.134)	(6.544)	(3.637)	(7.120)	(11)	(32.447)	(709)	(33.156)
Penyusutan dan amortisasi	(13.560)	(2.839)	(2.136)	(2.382)	(22)	(20.940)	494	(20.446)
Provisi diakui selama periode berjalan	(291)	(385)	(668)	(127)	(2)	(1.473)	(8)	(1.481)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2018	2017
Hasil segmen	41.706	43.525
Rugi usaha unit bisnis	(798)	(786)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	(2.063)	1.168
Laba usaha konsolidasi	38.845	43.907

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi Geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2018	2017
Pendapatan eksternal		
Indonesia	127.438	125.970
Luar negeri	3.346	2.286
Jumlah	130.784	128.256

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	2018	2017
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	144.631	130.468
Luar negeri	3.649	3.233
Jumlah	148.280	133.701

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon selular (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah, dan/atau
- Tarif jasa multimedia, dengan struktur tarif sebagai berikut:
 - Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	7.988
Dolar A.S.	94	1.349
Euro	1,23	20
HKD	0,79	1
Jumlah		9.358

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, TII dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	10 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sabang - Lhokseumawe - Medan (SLM)
Perusahaan dan PT Sisindokom Lintas Buana	15 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan PE-VPN CISCO
Perusahaan dan PT Sisindokom Lintas Buana	26 April 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan PE-VPN CISCO
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	31 Mei 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OLT dan ONT Platform ZTE
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	13 September 2018	Perjanjian Pengadaan ONT <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	30 Oktober 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Set Top Box (STB) Platform ZTE Tahap-2</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	23 November 2018	Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Huawei</i>
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Nokia NARU 2018</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	13 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan ISP SKKL <i>Platform NEC untuk NARU 2018 dan Reengineering Transport</i>
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	14 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan Metro Ethernet <i>Platform Nokia-ALU</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	17 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet, BRAS, PCEF, dan PE <i>Transit Platform Huawei</i>
Perusahaan dan PT Mastersystem Infotama	31 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP <i>Backbone Platform CISCO</i>
Perusahaan dan PT Lancs Arche Consumma	31 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Coriant Naru 2018</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT NSN, NSN Oy dan Nokia Siemens Networks GmbH & Co.KG	17 April 2008	Perjanjian pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements</i>)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Ericsson AB	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i>)
Telkomsel, PT Datacraft Indonesia, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian Next Generation Convergence Core Transport Rollout dan Technical Support
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS")</i> and <i>Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk Pengembangan dan Perpanjangan <i>Customer Relationship Management</i> dan <i>Contact Center Solutions</i>
Telkomsel dan PT Huawei	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex</i>
Telkomsel dan Wipro Limited, Wipro Singapore Pte. Ltd. dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT NSNI, NSN Oy, PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2018	Perjanjian Ultimate Radio Network Infrastructure ROA dan TSA

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

(i) Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan
BRI	500	14 Maret 2020	Rp	280
BNI	850	31 Maret 2019	Rp	261
Bank Mandiri	500	23 Desember 2019	Rp	361
Jumlah	1.850			902

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan, bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas – fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp1.000 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 25 September 2022. Pada tanggal 31 Desember 2018, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp499 miliar sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan sebesar Rp20 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 (Catatan 34c.i).

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 April 2019.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp2.100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2019. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp52,2 miliar (Catatan 34c.iii) dan untuk *surety bond* sebesar Rp1.030 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio 2,3 GHz (Catatan 34c.i).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta setara dengan Rp202 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum V (kelima) pada tanggal 18 Desember 2017 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$10 juta setara dengan Rp135 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 18 Desember 2018. Per tanggal 31 Desember 2018, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.
- (iv) Pada tanggal 31 Desember 2018, Sigma memiliki fasilitas bank garansi dari BNI dan HSBC sebesar Rp354 miliar. Saldo fasilitas bank garansi yang digunakan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp156 miliar.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, yang menggantikan Surat Keputusan No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, dan No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 34b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2019 hingga 2028. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah</u>	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>1-5 tahun</u>	<u>Lebih dari 5 tahun</u>
Sebagai <i>lessee</i>	23.832	6.271	13.030	4.531
Sebagai <i>lessor</i>	4.105	1.084	2.464	557

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 8 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No.792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima pembayaran dari BPPPTI sebesar Rp83 miliar (sebelum pajak).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat piutang Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah sebesar Rp115 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2018			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	253,37	8,02	10,50	3.802
Aset keuangan lancar lainnya	14,56	-	1,30	223
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,49	-	-	7
Pihak ketiga	146,39	-	9,55	2.238
Piutang lain-lain	0,34	-	0,12	6
Aset lancar lainnya	-	-	0,51	14
Aset tidak lancar lainnya	57,42	-	1,17	840
Jumlah aset	<u>472,57</u>	<u>8,02</u>	<u>23,15</u>	<u>7.130</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,21)	-	-	(3)
Pihak ketiga	(206,20)	(33,39)	(4,99)	(3.037)
Utang lain-lain	(3,63)	-	(4,44)	(111)
Biaya yang masih harus dibayar	(47,10)	(15,64)	(2,51)	(709)
Pinjaman bank jangka pendek	(1,15)	-	-	(17)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,76)	-	-	(11)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,77)	(767,90)	(4,07)	(430)
Liabilitas lainnya	(19,63)	-	-	(284)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93,41)	(3.839,49)	(4,71)	(1.917)
Jumlah liabilitas	<u>(390,86)</u>	<u>(4.656,42)</u>	<u>(20,72)</u>	<u>(6.519)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>81,71</u>	<u>(4.648,40)</u>	<u>2,43</u>	<u>611</u>
	2017			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	154,07	7,47	8,37	2.201
Aset keuangan lancar lainnya	28,34	-	1,14	399
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3,02	-	-	41
Pihak ketiga	71,38	-	4,24	1.025
Piutang lain-lain	0,15	-	0,01	2
Aset lancar lainnya	0,10	-	72,33	18
Aset tidak lancar lainnya	4,27	-	0,06	59
Jumlah aset	<u>317,22</u>	<u>7,47</u>	<u>87,09</u>	<u>3.745</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,22)	-	-	(3)
Pihak ketiga	(159,65)	(19,57)	(7,41)	(2.227)
Utang lain-lain	(4,12)	-	(7,41)	(149)
Biaya yang masih harus dibayar	(42,20)	(18,28)	(1,05)	(584)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(7)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,59)	(767,90)	-	(292)
Liabilitas lainnya	(21,83)	-	-	(296)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(65,22)	(4.607,39)	-	(1.557)
Jumlah liabilitas	<u>(304,31)</u>	<u>(5.413,14)</u>	<u>(15,87)</u>	<u>(5.115)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>12,81</u>	<u>(5.405,67)</u>	<u>71,22</u>	<u>(1.370)</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018 menggunakan kurs tanggal 29 April 2019, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp17 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Klasifikasi

i. Aset keuangan

	2018	2017
Utang dan piutang		
Kas dan setara kas	17.439	25.145
Aset keuangan lancar lainnya	834	1.005
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	12.141	9.564
Aset tidak lancar lainnya	460	183
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.204	1.541
Jumlah aset keuangan	32.078	37.438

ii. Liabilitas keuangan

	2018	2017
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	15.214	15.791
Beban yang masih harus dibayar	12.769	12.630
Pinjaman		
Utang bank jangka pendek	4.043	2.289
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	949	1.098
Obligasi dan wesel bayar	10.481	8.982
Utang bank jangka panjang	23.225	18.004
Utang sewa pembiayaan	3.145	3.804
Pinjaman lainnya	2.244	1.295
Jumlah liabilitas keuangan	72.070	63.893

b. Nilai wajar

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
2018					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.204	1.204	470	-	734
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	949	898	-	-	898
Obligasi dan wesel bayar	10.481	10.894	9.380	-	1.514
Utang bank jangka panjang	23.225	22.878	-	-	22.878
Utang sewa pembiayaan	3.145	3.145	-	-	3.145
Pinjaman lainnya	2.244	2.154	-	-	2.154
Liabilitas lainnya	261	261	-	-	261
Jumlah	41.509	41.434	9.850	-	31.584

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Nilai wajar (lanjutan)

2017	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.541	1.541	1.151	17	373
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.098	1.116	-	-	1.116
Obligasi	8.982	10.038	10.038	-	-
Utang bank jangka panjang	18.004	18.108	-	-	18.108
Utang sewa pembiayaan	3.804	3.804	-	-	3.804
Pinjaman lainnya	1.295	1.370	-	-	1.370
Liabilitas lainnya	296	296	-	-	296
Jumlah	35.020	36.273	11.189	17	25.067

Kerugian atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018 senilai Rp10 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2018.

c. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya karena diukur berdasarkan hasil dari pendiskontoan arus kas di masa yang akan datang.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Nilai wajar obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (ii) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

2. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	2018		2017	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,47	0,01	0,26	0,01
Liabilitas keuangan	(0,39)	(4,66)	(0,31)	(5,41)
Eksposur bersih	0,08	(4,65)	(0,05)	(5,40)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2018 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
31 Desember 2018	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	12
Yen Jepang (penguatan 5%)	(30)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2018 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 15 dan 16). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Pinjaman bunga tetap	(21.260)	(14.204)
Pinjaman bunga mengambang	(22.827)	(21.267)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Desember 2018, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp67 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	2018	2017
Kas dan setara kas	17.439	25.145
Aset keuangan lancar lainnya	1.304	2.173
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	12.141	9.564
Aset tidak lancar lainnya	460	183
Jumlah	31.344	37.065

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan.

Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya dikarenakan dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 4,30% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2019	2020	2021	2022	2023 dan selanjutnya
2018							
Utang usaha dan lain-lain	15.214	(15.214)	(15.214)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.769	(12.769)	(12.769)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	949	(1.075)	(242)	(232)	(205)	(159)	(237)
Obligasi dan wesel bayar	10.481	(19.050)	(1.562)	(3.436)	(1.231)	(2.817)	(10.004)
Utang bank	27.268	(33.363)	(10.434)	(9.160)	(3.991)	(3.219)	(6.559)
Pinjaman lainnya	2.244	(2.905)	(490)	(570)	(533)	(495)	(817)
Utang sewa pembiayaan	3.145	(3.764)	(1.049)	(945)	(781)	(605)	(384)
Liabilitas lainnya	261	(306)	(16)	(36)	(36)	(109)	(109)
Jumlah	72.331	(88.446)	(41.776)	(14.379)	(6.777)	(7.404)	(18.110)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2018	2019	2020	2021	2022 dan selanjutnya
2017							
Utang usaha dan lain-lain	15.791	(15.791)	(15.791)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.630	(12.630)	(12.630)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	1.098	(1.243)	(250)	(222)	(214)	(189)	(368)
Obligasi	8.982	(18.278)	(929)	(929)	(2.873)	(726)	(12.821)
Utang bank	20.293	(24.378)	(7.655)	(5.078)	(4.006)	(2.660)	(4.979)
Pinjaman lainnya	1.295	(1.759)	(220)	(303)	(285)	(266)	(685)
Utang sewa pembiayaan	3.804	(4.685)	(1.083)	(969)	(866)	(778)	(989)
Liabilitas lainnya	296	(355)	(17)	(34)	(34)	(135)	(135)
Jumlah	64.189	(79.119)	(38.575)	(7.535)	(8.278)	(4.754)	(19.977)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2018	Arus kas bersih	Perubahan non tunai			31 Desember 2018
			Akuisisi	Perubahan valuta asing	Sewa baru	
Utang bank jangka pendek	2.289	1.757	-	(1)	(2)	4.043
Pinjaman penerusan <i>(two step loan)</i>	1.098	(220)	-	72	-	950
Obligasi dan wesel bayar	8.982	1.497	-	-	2	10.481
Utang bank jangka panjang	18.004	5.046	58	90	28	23.226
Pinjaman lainnya	1.295	947	-	-	-	2.242
Utang sewa pembiayaan	3.804	(828)	-	-	168	3.145
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	35.472	8.199	58	161	168	44.087

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	2018		2017	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	4.043	2,83%	2.289	1,78%
Utang jangka panjang	40.044	28,00%	33.183	25,89%
Total utang	44.087	30,83%	35.472	27,67%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	98.910	69,17%	92.713	72,33%
Jumlah	142.997	100,00%	128.185	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Jumlah utang dengan bunga	44.087	35.472
Dikurangi: kas dan setara kas	(17.439)	(25.145)
Utang bersih	26.648	10.327
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	98.910	92.713
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	26,94%	11,14%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 16, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	4.275	5.525
Sewa pembiayaan	201	518
Kapitalisasi bunga	270	328
Uang muka	2.837	-
Penambahan aset tak berwujud melalui:		
Utang usaha	235	846

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019 dan No. 13 tanggal 21 Januari 2019 Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Telkomsel Mitra Inovasi ("PT TMI") dan PT Fintek Karya Nusantara ("PT Finarya") dengan kepemilikan penuh oleh Telkomsel.
- Pada tanggal 25 Januari dan 14 Februari 2019, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman MUFG dan BNI masing-masing sebesar Rp750 miliar dan Rp1.000 miliar.
- Berdasarkan akta Notaris Jimmy Tanal, SH. M.Kn., No. 22 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dari para pemegang saham PT Persada Sokka Tama ("PST"), disetujui pengalihan hak atas saham PST kepada Dayamitra dari Nyonya Rahina Dewayani dan Nyonya Rahayu sebesar masing-masing 2.559.000 dan 6.000 lembar saham sehingga Dayamitra memiliki 2.565.000 lembar saham atau 95% kepemilikan di PST.

PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	Total
Aset	
Kas dan Setara Kas	5
Piutang Usaha	121
Aset tetap (Catatan 9)	1.107
Aset lainnya	113
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(129)
Liabilitas jangka panjang	(378)
Liabilitas lainnya	(104)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	735
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(37)
<i>Provisional goodwill</i>	415
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	1.113

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

4. Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima keputusan dari Mahkamah Agung sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk masa pajak Januari s.d. April dan September 2007. Berdasarkan keputusan, Mahkamah Agung menolak banding Otoritas Pajak dan menguatkan keputusan Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 11 Maret 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan Perusahaan, di mana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan penambahan jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. April 2016.

5. Pada tanggal 18 Februari 2019, Telkomsel menerima SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar. Pada tanggal 25 Maret 2019, Telkomsel menerima pembayaran SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. IKHTISAR PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (“IFRS”)

Dibawah ini disajikan ikhtisar perbedaan signifikan antara PSAK dan IFRS untuk tahun 2018.

Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Referensi	PSAK	Rekonsiliasi	IFRS
ASET				
Kas dan setara kas	d	17.439	(4)	17.435
Aset keuangan lancar lainnya	d	1.304	10	1.314
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang				
Pihak berelasi	b,d	2.126	(112)	2.014
Pihak ketiga	b,d	9.288	(2.001)	7.287
Aset kontrak	c	-	1.560	1.560
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	d	727	(100)	627
Biaya kontrak	c	-	924	924
Aset lancar lainnya	d	7.982	(702)	7.280
Jumlah Aset Lancar		43.268	(425)	42.843
Penyertaan jangka panjang	d	2.472	190	2.662
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	a	143.248	(336)	142.912
Aset pajak tangguhan - bersih	c,d	2.504	(27)	2.477
Biaya kontrak	c,d	-	320	320
Aset tidak lancar lainnya	a	9.672	(18)	9.654
Jumlah Aset Tidak Lancar		162.928	129	163.057
JUMLAH ASET		206.196	(296)	205.900
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Utang usaha				
Pihak berelasi	b	993	1.496	2.489
Pihak ketiga	b	13.773	(1.496)	12.277
Pendapatan diterima di muka	c	5.190	(5.190)	-
Liabilitas kontrak	c	-	5.252	5.252
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		46.261	62	46.323
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	c,d	1.252	(55)	1.197
Pendapatan diterima di muka	c	652	(652)	-
Liabilitas kontrak	c	-	652	652
Pinjaman jangka panjang	b	33.748	(5)	33.743
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		42.632	(60)	42.572
JUMLAH LIABILITAS		88.893	2	88.895
EKUITAS				
Tambahan modal disetor		2.455	(479)	1.976
Komponen ekuitas lainnya		507	(186)	321
Saldo laba		90.995	493	91.488
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		98.910	(172)	98.738
Keperentingan nonpengendali		18.393	(126)	18.267
JUMLAH EKUITAS		117.303	(298)	117.005
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		206.196	(296)	205.900

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”) (lanjutan)

Dampak perbedaan atas pos-pos Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 antara PSAK dan IFRS adalah sebagai berikut:

		PSAK	Rekonsiliasi	IFRS
PENDAPATAN	c	130.784	4	130.788
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	c	(43.791)	(102)	(43.893)
Beban penyusutan dan amortisasi	a	(21.406)	(36)	(21.442)
Beban pemasaran	c	(4.214)	213	(4.001)
Beban umum dan administrasi	d	(6.137)	(457)	(6.594)
Laba selisih kurs - bersih	d	68	3	71
Penghasilan lain-lain	d	1.752	(7)	1.745
Beban lain-lain	d	(750)	70	(680)
LABA USAHA		38.845	(312)	38.533
Biaya pendanaan	c	(3.507)	(16)	(3.523)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		36.405	(328)	36.077
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(9.426)	60	(9.366)
LABA TAHUN BERJALAN		26.979	(268)	26.711
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		146	2	148
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	d	(10)	10	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		4.942	12	4.954
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		31.921	(256)	31.665
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		18.032	(230)	17.802
Kepentingan nonpengendali		8.947	(38)	8.909
		26.979	(268)	26.711
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		22.844	(216)	22.628
Kepentingan nonpengendali		9.077	(40)	9.037
		31.921	(256)	31.665
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)				
Laba bersih per saham		182,03	(2,32)	179,71
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		18.202,70	(232,18)	17.970,52

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* ("IFRS") (lanjutan)

a. Hak atas tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional maupun internasional.

c. Pengakuan pendapatan dan beban

Berdasarkan PSAK, pendapatan diakui jika entitas sudah mentransfer seluruh risiko atas barang kepada pembeli atas penjualan barang dan entitas tidak lagi memiliki pengendalian efektif atas barang tersebut. Sedangkan untuk penjualan jasa, pendapatan diakui jika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Beban diakui pada saat terjadinya.

Berdasarkan IFRS, pendapatan diakui ketika pengendalian atas suatu produk atau jasa ditransfer kepada pelanggan dan diukur berdasarkan nilai yang diharapkan diterima dalam suatu kontrak dengan pelanggan. Lebih lanjut, ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas, bergantung pada hubungan antara kinerja dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.

Selain itu, IFRS mensyaratkan biaya yang timbul atas perolehan kontrak dan biaya pemenuhan kontrak sebagai aset sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

d. Instrumen keuangan

Berdasarkan PSAK, pengklasifikasian aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan intensi manajemen. Pengakuan cadangan kerugian atas aset keuangan menggunakan metode *incurred loss* dimana cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk ketika kualitas aset keuangan telah menurun.

Berdasarkan IFRS, pengklasifikasian aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis entitas dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Pengakuan cadangan kerugian atas aset keuangan menggunakan metode *expected credit loss* dimana cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sepanjang aset keuangan tersebut dimiliki oleh Perusahaan dan dimulai sejak aset keuangan tersebut diperoleh.